



KADIN NEWS

VOL. 3 | OKTOBER 2023



Komitmen Turunkan Stunting di Indonesia, Kadin Indonesia dan Kompas Gramedia Jadi yang Terdepan Pimpin Gerakan

“Bersama Entaskan Stunting”

Bulan Inklusi Keuangan 2023:
Kadin Indonesia Fokus Perkuat Edukasi
Masyarakat dengan Mendorong Peningkatan
Literasi dan Inklusi Keuangan

Berperan Aktif dalam
Pengembangan Ibu Kota Negara
Nusantara, Kadin Indonesia
Gelar Konsultasi Peluang Investasi

Kadin Indonesia dan
Kementerian Perdagangan
Dorong Ekspor Indonesia melalui
Gelaran TEI 2023

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

01	Sambutan Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia	FGD/Seminar	03
62	Manfaat Keanggotaan Kadin	Program Pengurus	06
63	Cara Pendaftaran Anggota Kadin	Kegiatan Bersama dengan Kementerian/Lembaga/Asosiasi	15
64	Fitur Terbaru Website Kadin	Inisiatif Internal	29
65	Kabar Terkini: Aturan Baru Pemerintah untuk Permudah Ekspor UMKM	Kunjungan Internasional	30
68	Kabar Terkini: Merintis Jalan Baru: Strategi Nasional Indonesia untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia	Penandatanganan Nota Kesepahaman	36
72	Acara Mendatang	Liputan Khusus	40
73	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin for Naker	Special Section: Konsultasi Peluang Investasi IKN	45
74	Inisiatif Kadin Indonesia: Wiki Wirausaha	Special Section: Trade Expo Indonesia 2023	47
75	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin Net Zero Hub	Special Section: Bulan Inklusi Keuangan	51
76	Inisiatif Kadin Indonesia: TRADE	Special Section: Indonesia Emas 2045	56
		Special Section: Kadin Impact Award 2023	57

SAMBUTAN PELAKSANA TUGAS HARIAN KETUA UMUM

Kadin Indonesia



Gerakan ini merupakan bentuk dukungan kita bersama terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting yaitu mencapai 14% pada tahun 2024

**Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya,
Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua**

Puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan kelimpahanNya, bulan Oktober dapat kita lalui dengan baik. Pada bulan kesepuluh di tahun ini, telah terdapat banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Kadin Indonesia. Terucap syukur pula karena *newsletter* Kadin Indonesia yang kami beri nama Kadin News, berhasil tersusun dalam Volume 3.

Salah satu agenda penting selama bulan Oktober telah tergambar pada halaman awal Kadin News, yaitu kolaborasi antara Kadin Indonesia dengan Kompas Gramedia dalam program Perancangan Inisiatif Gotong Royong untuk Pengentasan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem melalui Gerakan “Bersama Entaskan Stunting” (BERES). Gerakan ini merupakan bentuk dukungan kita bersama terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting yaitu mencapai 14% pada tahun 2024.

Selain itu pada edisi kali ini, bertepatan dengan momen Bulan Inklusi Keuangan yang jatuh pada bulan Oktober setiap tahunnya, Kadin Indonesia juga berkesempatan mewawancarai beberapa Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dari berbagai bidang relevan untuk membahas peran Kadin Indonesia dalam mendorong inklusi keuangan di tanah air.

Alhamdulillah, tentunya seluruh agenda kegiatan Kadin Indonesia yang terlaksana selama bulan Oktober telah terangkum dalam *newsletter* ini.

Semoga melalui *newsletter* yang Bapak/Ibu dan saudara/i baca saat ini, seluruh kerja keras dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kadin Indonesia dapat tersampaikan dengan baik untuk diketahui dan menjadi referensi demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

Akhir kata, mari kita dukung bersama program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kadin Indonesia.

Salam,

Yukki Nugrahawan Hanafi

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia

Sorotan Kegiatan **Bulan Ini**



FGD/SEMINAR



PROGRAM
PENGURUS



KEGIATAN BERSAMA
DENGAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA/ASOSIASI



INISIATIF
INTERNAL



KUNJUNGAN
INTERNASIONAL



PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN



LIPUTAN
KHUSUS



SPECIAL SECTION:
KONSULTASI PELUANG
INVESTASI IKN



SPECIAL SECTION:
TRADE EXPO INDONESIA
2023



SPECIAL SECTION:
BULAN INKLUSI
KEUANGAN



SPECIAL SECTION:
INDONESIA EMAS
2045



SPECIAL SECTION:
KADIN IMPACT
AWARD 2023

FGD/SEMINAR

Peran Aktif Kadin Indonesia dalam Optimalisasi Peran Badan Bank Tanah

Penyediaan tanah untuk pembangunan merupakan elemen kunci dalam mendorong dunia usaha, terutama dalam sektor industri dan properti. Salah satu hal yang sangat penting dalam konteks ini adalah kepastian hukum atas hak atas tanah bagi para pelaku usaha. Tanpa kepastian hukum yang memadai, proses pembangunan dan investasi dalam bisnis industri dan properti akan sulit berkembang.

Tantangan utama dalam penyediaan tanah adalah kompleksitas peraturan hukum tanah, pemilikan lahan yang seringkali tidak jelas, dan proses administratif yang rumit. Oleh karena itu, penguatan model bisnis Badan Bank Tanah (BBT) merupakan salah satu strategi untuk mengatasi tantangan ini.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang optimal, BBT perlu memiliki model bisnis yang efektif. Hal ini menjadi fokus utama dalam tujuan dari *Forum Group Discussion* (FGD) "Strategi Pengelolaan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Penguatan Model Bisnis Badan Bank Tanah" yang digelar oleh Badan Bank Tanah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 4 Oktober 2023 di Artotel Suites Mangkuluhur. FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan tanah untuk berbagai kepentingan, terutama dalam konteks pembangunan.



Kadin Indonesia melalui WKU Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Industri, Sanny Iskandar, turut memberikan pandangan industri dalam kegiatan ini. Beliau menyampaikan tantangan dan harapan penyediaan tanah untuk mendorong dunia usaha dalam bisnis industri dan properti yang menekankan pada perlunya kepastian hukum Hak Atas Tanah bagi para pelaku usaha.

Tujuan utama dibentuknya BBT melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 adalah untuk mengoptimalkan peran pemerintah sebagai pengelola tanah. Selama ini, peran pemerintah dalam urusan tanah lebih cenderung terfokus sebagai administrator dan regulator tanah.

Sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah membentuk Badan Bank Tanah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan peran pemerintah sebagai pengelola tanah. Selama ini, peran pemerintah dalam urusan tanah lebih cenderung terfokus sebagai administrator dan regulator tanah.

Menyadari kondisi tersebut, hadirnya BBT memiliki peran penting dalam melengkapi peran negara sebagai pengelola tanah. Hingga saat ini, pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), masih hanya menjalankan fungsinya sebagai administrator dan regulator tanah.

(lanjutan di halaman 4)



Dalam konteks penyediaan tanah untuk pembangunan, harapan utama adalah menciptakan iklim bisnis yang mendukung pertumbuhan sektor industri dan properti. Ini termasuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki akses yang mudah ke tanah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi investasi mereka. Melalui penguatan model bisnis Badan Bank Tanah dan kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan, kita dapat mencapai tujuan ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

FGD/SEMINAR

Kadin Indonesia Hadiri Seminar Koinfo: Perkuat Potensi Kerja Sama Pemberdayaan Talenta Digital

Kemajuan teknologi digital yang semakin berkembang pesat berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan talenta digital atau tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknologi informasi yang mumpuni. Kebutuhan tenaga kerja di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tahun 2022 hingga 2025 diproyeksikan terus meningkat.

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan, sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan pada sektor TIK pada 2025 diestimasikan mencapai hingga 1.979.418 pekerja. Namun, di sisi lain, keterangan dari Digital Talent Scholarship Koinfo menunjukkan hanya sekitar 30 persen dari masyarakat Indonesia yang telah memiliki keterampilan digital dasar.



Melihat adanya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja yang mumpuni dengan jumlah SDM yang tersedia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Koinfo) melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan seminar Identifikasi Potensi Kerja Sama Pemberdayaan SDM Digital pada 10 Oktober 2023.

Mewakili Kadin Indonesia, Ketua Komtap Sertifikasi Profesi Hari Wijaya, Wakil Komite Tetap Pemagangan Luar Negeri Muhamad Abdul Karim, dan Wakil Komite Tetap Transformasi dan Revitalisasi Satria Gunayoman, menghadiri diskusi tersebut yang bertempat di Jambuluwuk Thamrin Hotel. Pada gelaran ini, turut hadir pula Kepala Puslitbang Aptika dan Informasi Komunikasi Publik (IKP) Koinfo, Drs. Sunarno, MM.

Seminar yang dibalut dalam bentuk diskusi interaktif ini fokus mengeksplorasi lebih jauh mengenai langkah jangka panjang yang perlu diambil untuk mengidentifikasi potensi kerja sama SDM digital. Kadin Indonesia yakin melalui pemberdayaan SDM digital yang diupayakan dengan baik dan kolaboratif, maka dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang dan meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia.

FGD/SEMINAR

Persiapan Menuju COP 28: Kadin Indonesia Adakan FGD untuk Menangkap Aspirasi ALB

Tahun ini, the Conference of the Parties (COP) 28 akan digelar pada 30 November–12 Desember 2023 di Dubai, UEA. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP 28 ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Kesepakatan yang dihasilkan dalam konferensi ini akan sangat memengaruhi arah langkah-langkah yang akan diambil untuk menjaga lingkungan dan mencapai tujuan perubahan iklim yang lebih berkelanjutan di masa depan pada tingkat global.

Sebagai persiapan menjelang KTT tersebut, Pokja Sustainability Kadin Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Climate Diplomacy: Road to COP 28 Summit”, pada 27 Oktober 2023.

Acara dibuka oleh WKU Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani, dan WKU Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Silverius Oscar Unggul, Anggota Komite Eksekutif Kadin Net Zero Hub Anthony Utomo, dan Anggota Kelompok Kerja Electric Mobility Kadin Indonesia Rahmad Widjaja Sakti. Selain itu, juga hadir perwakilan dari organisasi sipil seperti World Resources Institute (WRI), Carbon Disclosure Project (CDP), Koalisi Ekonomi Membumi, World Wildlife Fund (WWF), Fairatmos, serta berbagai asosiasi terkait dengan isu-isu keberlanjutan, seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI). Acara ini dipandu oleh Noto Suoneto dari Kadin International Affairs Office selaku moderator.

Seluruh narasumber ini memiliki keahlian dalam topik-topik yang relevan dengan 63 topik sesi talkshow yang akan dibahas pada Paviliun Indonesia mendatang. Paviliun Indonesia merupakan suatu ruang pameran Indonesia yang terdapat dalam rangkaian acara COP 28, dimana Indonesia akan berkesempatan untuk mempertunjukkan langkah konkret yang sudah dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim.

Masukan dari para peserta FGD ini akan menjadi landasan bagi Delegasi RI (DELRI) Kadin Indonesia untuk melakukan kegiatan *talkshow* maupun pertemuan dengan sejumlah pihak di KTT COP 28 mendatang.



PROGRAM PENGURUS

Rapat Konsolidasi Program Asosiasi dan Vokasi Kadin Indonesia: Upaya Tingkatkan Sinergi dan Koordinasi untuk Mendorong Keberhasilan Program Vokasi Nasional

Koordinasi dan terbangunnya pola kerja yang sinergis menjadi bagian penting dalam berjalannya suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antarbidang yang ada di Kadin Indonesia, Bidang Asosiasi dan Himpunan menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Program Kerja bersama Bidang Vokasi dan Sertifikasi pada 10 Oktober 2023.



Rapat yang bertempat di Menara Kadin ini membawa beberapa agenda penting. Pembahasan pertama berfokus pada peningkatan koordinasi dan konsolidasi antarpengurus Bidang Asosiasi dan Himpunan dengan Bidang Vokasi dan Sertifikasi, mengingat terbentuknya koordinasi yang baik akan memungkinkan antarbidang bersinergi dengan maksimal dalam melaksanakan program kerja.

Selain itu, pembahasan mengenai upaya melakukan penajaman kompetensi dari 15 klaster asosiasi yang ada di Kadin Indonesia juga menjadi agenda dalam pertemuan ini. Melalui kompetensi yang memadai berbagai klaster asosiasi diharapkan dapat memiliki kompetensi yang relevan untuk siap menghadapi perubahan bisnis yang cepat.

WKU Bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo, dan WKU Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz, bertemu secara langsung dalam rapat konsolidasi tersebut. Dalam agenda rapat yang dilakukan, Ketua Komite Tetap Koordinasi Asosiasi Jasa Tenaga Kerja, Cecep Dharmadi, ditunjuk sebagai *Person in Charge* (PIC) dari Bidang Asosiasi dan Himpunan, sedangkan Ketua Komite Tetap Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Industri, Masbukhin, ditunjuk sebagai PIC dari Bidang Vokasi dan Sertifikasi.



PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Bersama BI dan Kemenkeu Dorong Aturan DHE Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan percepatan hilirisasi SDA, yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA).

Regulasi ini menjadi perhatian bagi pelaku dunia usaha Indonesia, khususnya 18 asosiasi sektoral terdampak dari sektor pertambangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, karena adanya ketentuan yang mewajibkan perusahaan eksportir untuk menempatkan minimal 30% DHE SDA pada rekening khusus DHE SDA di dalam sistem Keuangan Indonesia dengan jangka waktu minimal 3 bulan.



Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan dukungannya dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023 tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. Penerbitan kedua peraturan ini memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi nasional dan bisnis, mengingat perubahan regulasi ini dapat memengaruhi aliran dana dan proses ekspor-impor, yang memiliki implikasi turunan pada kegiatan usaha yang luas.

Memantau Implementasi PBI No. 7/2023

Dalam rangka mewujudkan komitmen sebagai wadah para pelaku usaha di tanah air, Kadin Indonesia melangsungkan pertemuan lanjutan untuk membahas regulasi DHE bersama Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan pada 12 Oktober 2023 di Bank Indonesia.

Dalam agenda bersama beberapa pemangku kepentingan ini, Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, bersama jajaran pimpinan WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita, Kepala Badan Moneter dan Jasa Keuangan Tigor M. Siahaan, WKU Bidang Kelautan dan Perikanan Joseph Pangalila, Perwakilan Asosiasi sektor Pertambangan Hendra Sinadia, Perwakilan Asosiasi sektor Pertanian Arief Susanto dan Wakil Ketua Komite Tetap Migas Bidang ESDM Sarwi bertemu langsung dengan perwakilan Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

(lanjutan di halaman 8)



Kadin Indonesia menyampaikan masukan dan aspirasi yang terkumpul dari sektor-sektor yang terdampak, tidak terkecuali usulan dunia usaha terkait regulasi DHE untuk menjadi pertimbangan pemerintah. Selain usulan untuk menjadikan regulasi DHE lebih tepat sasaran, pertemuan tersebut juga sekaligus memantau implementasi dari PBI No. 7/2023. Sebagai tindak lanjut, masukan dan usulan dari Kadin akan dibahas pada satgas percepatan ekspor yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian.

PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Bahas Peranan Strategis Hutan dalam Bisnis dan Keberlanjutan

Ketika dunia sedang berupaya menemukan cara untuk pulih dari krisis, hutan memegang peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hutan memiliki potensi untuk menjadi motor ekonomi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat perlu berkontribusi dalam merawat, mengelola, melestarikan, dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan demi kesejahteraan generasi saat ini dan masa depan.



Dalam rangka memberikan wawasan kepada masyarakat tentang cara meningkatkan perekonomian sambil mendukung upaya pelestarian hutan dan peningkatan keanekaragaman jenis tanaman di Indonesia, Kadin Indonesia mengadakan acara *talkshow* yang bertajuk "Inspirasi Bisnis Bersama PED" dengan fokus topik *Forestry Business*, pada 13 Oktober 2023 di Menara Kadin Indonesia.

Talkshow ini mencakup beberapa aspek bisnis yang berhubungan dengan hutan, termasuk bisnis tanaman herbal, tanaman aromatik, dan pengembangan lanskap. *Talkshow* tersebut juga turut dihadiri sejumlah narasumber yang ahli dalam bidangnya, antara lain Direktur Costus Garden, Ira Puspa Kencana, dan Direktur PT. Natura Aromatik Nusantara, Mohammad Suprpto.

Dengan menggali wawasan dan pengalaman dari para ahli, Kadin Indonesia berharap dapat membantu mendorong perkembangan sektor kehutanan dan industri terkait, dengan fokus pada keberlanjutan dan kemakmuran ekonomi.

PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Rumuskan Narasi Tunggal Kelapa



Kelapa masih menduduki posisi sebagai komoditas perkebunan unggulan kedua setelah komoditas kelapa sawit. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, nilai ekonomi yang dihasilkan sektor ini mencapai Rp30 triliun pada tahun 2022. Produk turunannya pun terus dikembangkan dan didorong agar mampu berorientasi ekspor.

Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, produksi kelapa nasional pada tahun 2023 mencapai 2,839 juta ton. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,05% dibandingkan dengan produksi kelapa nasional pada tahun 2022 yang mencapai 2,940 juta ton. Besarnya minat pasar luar negeri terhadap komoditas kelapa, juga turut mendorong pemerintah melakukan upaya pengembangan agribisnis kelapa melalui penyediaan bibit yang berkualitas dan pengembangan industri pengolahan kelapa melalui diversifikasi produk turunan kelapa.



Menyikapi potensi ini, Kadin Indonesia menyelenggarakan rapat pembahasan narasi tunggal kelapa bersama PISAgro dan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) pada 13 Oktober 2023. Ketua Komite Tetap Perkebunan, Harry Hanawi, dan Wakil Komite Tetap Perkebunan, Rudy Hadiwidjaja, yang juga mewakili HIPKI, berdiskusi dengan lebih mendalam membahas mengenai penyusunan narasi tunggal kelapa dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas kelapa Indonesia di pasar global.

Narasi tunggal yang tersusun merupakan pernyataan ringkas yang menggambarkan posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir kelapa terbesar di dunia yang mampu merangkum keunggulan kelapa Indonesia. Keunggulan ini secara lebih detail mencakup segi kualitas, produktivitas, dan keberlanjutan.

Sebagai tindak lanjut, narasi tunggal yang sedang dalam proses pembahasan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing kelapa Indonesia di pasar global dan memberikan manfaat bagi petani dan pelaku usaha kelapa di Indonesia.

(lanjutan di halaman 10)

Perumusan Narasi Tunggal Usaha Sapi Perah Pasca PMK

Pasca kemunculan kasus pertama Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada April 2022, Kadin Indonesia menaruh atensi pada sektor usaha sapi perah. Atensi ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Narasi Tunggal pada 17 Oktober 2023 yang diadakan oleh Komite Tetap Peternakan Bidang Pertanian Kadin Indonesia. Rapat ini secara fokus membahas mengenai narasi tunggal usaha sapi perah pasca PMK.



WKU Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, hadir secara langsung dalam pertemuan yang mengusung agenda utama untuk penyempurnaan skema *closed loop* yang lebih mandiri dan berkelanjutan secara komersial setelah wabah PMK. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Ketua Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi, Executive Director PISAgro Insan Syafaat, hingga Head of Corporate Agriculture PT Nestle Indonesia Rudi Sahrudi.

PROGRAM PENGURUS

Rencana Dirikan Yayasan Resiliensi Bencana, Kadin Indonesia Fokus Berkontribusi Hadapi Tantangan Sosial dan Kebencanaan



Dalam beberapa waktu terakhir, dunia dihadapkan dengan berbagai bencana alam dan gejolak konflik geopolitik. Untuk berperan aktif berkontribusi di tengah situasi ini, Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis (SPB) Kadin Indonesia telah memulai sebuah inisiatif dengan merencanakan pendirian Yayasan Resiliensi Bencana, sebuah yayasan yang akan berfokus pada isu sosial dan kebencanaan.



Pendirian yayasan ini didukung oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yuki Nugrahawan Hanafi, WKU Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Carmelita Hartoto, dan WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Suryani Motik, yang turut hadir dalam pertemuan pada 13 Oktober 2023 untuk membahas lebih lanjut terkait pendirian yayasan.

(lanjutan di halaman 11)

Yayasan ini bertujuan untuk memudahkan penanganan permasalahan sosial yang mungkin timbul akibat bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang.



Melalui yayasan ini, Kadin Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa bantuan kepada korban bencana dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.

Selain pendirian yayasan, dalam rapat tersebut, juga diusulkan untuk mempertimbangkan kembali pengaktifan yayasan yang sudah ada sebelumnya, namun belum diberdayakan. Rencananya, Bidang SPB akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang khusus bertugas untuk melaksanakan pembentukan yayasan Kadin Indonesia. Semua langkah ini merupakan wujud komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung masyarakat dan negara dalam menghadapi tantangan sosial dan bencana yang mungkin terjadi di masa depan.

Program KUAT: Upaya Kadin Indonesia Mitigasi Bencana di Daerah Perkotaan dan Pinggiran Kota

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam. Laporan World Risk Report 2022 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara paling rawan bencana ketiga di dunia.

Kadin Indonesia melalui WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana (SPB), Suryani Motik, memimpin acara "Kick-Off Program Komunitas Perkotaan untuk Aksi Tangguh (KUAT) dengan USAID" pada 31 Oktober 2023. Program KUAT bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai pengurangan risiko bencana, ketangguhan, dan kesiapsiagaan di daerah perkotaan dan pinggiran kota yang berisiko tinggi dengan kolaborasi antara Kadin Kabupaten Bogor dan Kadin Kabupaten Tangerang. Program ini berfokus pada perencanaan risiko, kesiapsiagaan, pemulihan, dan melibatkan berbagai pihak dari sektor publik dan swasta dalam implementasinya.



PROGRAM PENGURUS

Jelang Rapimnas 2023, Kadin Indonesia Adakan Rapat Persiapan

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) merupakan agenda tahunan tingkat nasional Kadin Indonesia yang menghimpun seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Kadin di tingkat provinsi, kabupaten, kota, anggota luar biasa (ALB), hingga beberapa perwakilan kementerian/lembaga, dan tokoh masyarakat.

Penyelenggaraan Rapimnas sendiri akan menjadi forum untuk berdiskusi, berkolaborasi, hingga mengevaluasi keberhasilan kinerja melalui usulan program yang telah berjalan selama satu tahun terakhir. Rapimnas ini juga sekaligus menjadi momen untuk menguatkan kembali komitmen Satu Kadin yang inklusif, kolaboratif, dan progresif sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia.

Tahun ini, Kadin Indonesia berencana akan menyelenggarakan Rapimnas 2023. Sebagai upaya memastikan Rapimnas tahun ini berjalan dengan lancar, Bidang Organisasi telah melaksanakan rapat persiapan jelang pelaksanaan agenda tahunan ini.

Pada agenda rapat persiapan ini, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, membahas mengenai kesiapan pelaksanaan Rapimnas 2023. Sebagai tindak lanjut, Kadin Indonesia juga akan melakukan koordinasi kembali terkait persiapan yang dilakukan untuk mematangkan persiapan hingga menjelang pelaksanaan Rapimnas Desember mendatang.



Segera Hadir!

Rapat Pimpinan Nasional 2023
akan Segera Dilaksanakan pada
8 Desember 2023

PROGRAM PENGURUS

Dukung Upaya UMKM Naik Kelas, Kadin Indonesia Jajaki Peluang Kolaborasi dengan TikTok dan Pos Indonesia

Transformasi dan akselerasi digitalisasi yang merata dari kota hingga desa juga merupakan kunci dalam penguatan UMKM. Digitalisasi UMKM menjadi hal penting seiring dengan era digital yang membawa dampak ke segala bidang termasuk ekonomi. Berdasarkan data dari World Bank, 80 persen UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital memiliki ketahanan yang lebih baik.

Peran UMKM sangat berpengaruh dalam pemulihan ekonomi nasional, khususnya pasca pandemi Covid-19. Menurut keterangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, UMKM juga mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja di negara ini atau sekitar 119,6 juta orang. Meski demikian, tercatat baru sekitar 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital dan memanfaatkan *e-commerce*.

Didorong oleh semangat untuk mewujudkan UMKM naik kelas, Kadin Indonesia menginisiasi pertemuan dengan Bytedance (Tiktok) dan PT. Pos Indonesia pada 25 Oktober 2023. WKU Bidang Kominfo, Firlie H. Ganinduto, bersama Wakil Direktur Eksekutif I Sekretariat Kadin Indonesia (SKI), Mercy Simorangkir, menghadiri langsung pertemuan tersebut yang bertempat di Menara Kadin.

Pertemuan tersebut secara interaktif membahas mengenai peluang kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam program peningkatan kapasitas, khususnya UMKM terkait perkembangan *social commerce/live commerce*. Hal ini mengingat fitur *live streaming* memberikan kesempatan bagi pemilik usaha untuk menampilkan produk secara langsung melalui platform *e-commerce* dan melakukan proses jual beli yang lebih interaktif karena produk dapat ditampilkan secara *real-time*.

WKU Bidang Kominfo berharap program ini dapat stabil dan memberikan manfaat bagi perkembangan dunia usaha, khususnya usaha mikro dalam mengarungi disrupsi teknologi di era digitalisasi.



PROGRAM PENGURUS

Kadin Indonesia Tingkatkan Pemahaman tentang Logistik Bisnis Global di Era Digital



Pemahaman akan logistik bisnis global di era digital menjadi semakin penting dalam perkembangan ekonomi global saat ini. Era digital telah mengubah cara bisnis di seluruh dunia beroperasi, termasuk dalam hal logistik. Di tengah perubahan yang begitu cepat ini, Kadin Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam memberikan pemahaman dan mengoptimalkan logistik bisnis global di era digital.

Salah satu wujud komitmen Kadin Indonesia adalah dengan berpartisipasi dalam Kuliah Umum Mahasiswa Administrasi Bisnis Terapan “Understanding Global Business Logistics in Digital Era” pada 27 Oktober 2023. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yuki Nugrahawan Hanafi, membuka kuliah umum tersebut secara daring, sementara Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat, Cucu Sutara, membuka kuliah umum tersebut secara langsung di Gedung Pusat Unggulan Teknologi (PUT). Di samping itu, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, Akbar Djohan, menjadi pembicara pada kuliah umum tersebut yang dihadiri oleh sebanyak 150 mahasiswa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah ilmu serta wawasan mahasiswa mengenai bisnis logistik di era transformasi digital, memberikan edukasi kepada mahasiswa dan meningkatkan pengetahuan di bidang logistik, serta memotivasi dan memberi inspirasi kepada mahasiswa untuk meraih impian dan mencapai tujuan.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Rapimprov Kadin Sumatra Selatan: Dorong Penyelarasan dan Sinergitas di Daerah



Sebagai payung utama organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin Indonesia memastikan kehadirannya di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota. Representasi Kadin yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia memainkan peranan penting dalam mengarahkan perekonomian daerah maupun nasional. Semangat kolaboratif dan sinergi menjadi komponen penting untuk mewujudkan Kadin Indonesia yang inklusif, kolaboratif, dan progresif.



Kali ini, Kadin Provinsi Sumatra Selatan berkesempatan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) pada 27 Oktober 2023. Rapimprov Kadin Sumsel ini dibuka langsung secara resmi oleh Pj. Gubernur Sumsel, Dr Drs Agus Fatoni, M.Si, dan Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi.

(lanjutan di halaman 16)





Rapimprov kali ini membawa beberapa fokus bahasan, salah satunya bedah buku Indonesia Emas 2045 yang dilakukan langsung bersama WKU Bidang Organisasi sekaligus Ketua Tim Perumus Buku, Eka Sastra disusul dengan penyerahan secara simbolis Buku Indonesia Emas 2045 oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yikki Nugrahawan Hanafi kepada Ketua Umum Kadin Sumsel, Affandi Udji.



Mengingat pada September yang lalu telah disepakati 23 Peraturan Organisasi (PO) oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, pada Rapimprov kali ini Ketua Komtap Regulasi, Serioza Prakasa, dan Direktur Organisasi PO, Tata Wahyudin, memberikan sosialisasi PO kepada pengurus Kadin Sumsel dan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang ada di Sumatra Selatan.

Bersamaan dengan pelaksanaan Rapimprov, turut diselenggarakan pula Kadin Sumsel Expo 2023 di Palembang Sports and Convention Center (PSCC) pada 27-29 Oktober 2023. Dalam gelaran ini telah diluncurkan aplikasi Kadin Sumsel Pacak Begawe yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi alumni-alumni SMA melalui aplikasi dan juga pembinaan. Dalam expo ini, Kadin Indonesia juga turut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel terkait pelayanan hukum dan kemudahan perizinan pendirian perusahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatra Selatan.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Terus Himpun ALB Baru, Kadin Indonesia Lakukan Asistensi terhadap PEKERTI

Pemerintah telah menetapkan bahwa produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk PKRT, baik produksi dalam negeri maupun impor. Upaya ini telah resmi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Kebijakan tersebut mendasari terbentuknya Perkumpulan Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (PEKERTI) yang didirikan untuk membantu perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis PKRT di Indonesia dalam memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk. Pemangku kepentingan utama dari PEKERTI meliputi Kementerian Kesehatan, Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, Investasi/BKPM.

Dalam kapasitasnya sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin Indonesia terus menghimpun Anggota Luar Biasa (ALB) yang terdiri dari organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan. Kali ini, PEKERTI akan menjadi calon ALB Kadin Indonesia.

Sebagai bagian dari proses yang perlu ditempuh untuk menjadi ALB, Kadin Indonesia telah melakukan asistensi terhadap PEKERTI pada 3 Oktober 2023. Asistensi tersebut dihadiri langsung oleh WKU bidang Asosiasi dan Himpunan Wisnu W. Pettalolo, Sekretaris Jenderal PEKERTI Ervani Setya, dan perwakilan Sekretariat PEKERTI Dewi Puspa Rini.

Melalui asistensi ini, diharapkan Kadin Indonesia dan PEKERTI dapat bersinergi untuk menghadapi tantangan dalam sektor Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan berkontribusi pada perkembangan industri yang lebih baik.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Audiensi Kadin dengan ABI dan ASPAKRINDO: Percepat Penerbitan Regulasi Perdagangan Aset Kripto



Jumlah transaksi aset kripto di Indonesia saat ini sedang bertumbuh dengan pesat. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2023. Tercatat pada semester satu 2023, jumlah pelanggan aset kripto terdaftar di Indonesia mencapai 17,54 juta pelanggan. Jumlah ini meningkat 17,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 14,75 juta pelanggan.

Performa jual-beli aset kripto yang semakin berkembang ini menjadikan perdagangan di sektor ini memerlukan regulasi yang jelas untuk memastikan ekosistem bisnis di sektor ini berjalan baik. Terkait kepentingan ini, Kadin Indonesia telah melaksanakan pertemuan dengan Asosiasi dan Himpunan menerima audiensi dari ALB Kadin, yaitu Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) pada 3 Oktober 2023.



WKU bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo, hadir langsung dalam rapat yang dilakukan untuk membahas upaya menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan adil bagi perdagangan aset kripto di Indonesia.



Pertemuan tersebut sekaligus membahas mengenai upaya merger yang dilakukan oleh ABI dan ASPAKRINDO yang turut berdampak pada perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan kedua asosiasi tersebut. Keputusan merger ini diharapkan akan memperkuat suara industri aset kripto dalam berinteraksi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan teratur bagi ekosistem aset kripto di negara ini. Dengan sinergi yang tercipta, ABI dan ASPAKRINDO berkomitmen untuk bekerja sama dalam merumuskan solusi yang akan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di pasar aset kripto Indonesia.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

BRITEK Kadin Indonesia Lakukan Sinergi dengan Kadin Jawa Barat dan Kadin Kepulauan Riau

Indonesia terus berkomitmen untuk menjadi negara maju. Salah satu kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan riset dan inovasi. Anggaran riset dan inovasi sebesar Rp9,38 triliun yang dialokasikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2023 adalah langkah penting dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Anggaran tersebut diharapkan akan membantu BRIN dalam mendukung proyek-proyek riset, pengembangan teknologi, dan upaya-upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah, Kadin Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan BRIN mengenai Sinergitas Penyelenggaraan Program Riset Dan Inovasi Untuk Diversifikasi Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional. Selain itu, terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi-BRIN dengan Badan Riset dan Teknologi (BRITEK) Kadin Indonesia, yang bertujuan untuk mengatur tata kelola lembaga riset dan fasilitas manajemen riset dan inovasi. Penandatanganan MoU dan PKS ini dilakukan pada 10 Agustus 2023 lalu.

Selain menjadi mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia juga merupakan sebagai payung organisasi dunia usaha di Indonesia. Oleh karena itu, Kadin Indonesia berkomitmen untuk melakukan Program Sinergi Daerah bersama Kadin di seluruh Indonesia, termasuk dalam upaya memajukan riset dan inovasi di seluruh negeri.

Kadin BRITEK Selenggarakan Sinergi Jawa Barat

Kadin Indonesia melalui Badan Riset Teknologi (BRITEK) menyelenggarakan forum Sinergi Daerah pada 14 September 2023 bersama Kadin Jawa Barat. Forum yang mengusung tema "Membangun Ekosistem Penelitian dan Inovasi Melalui Tata Kelola Lembaga" ini fokus membahas penguatan ekosistem penelitian dan inovasi dalam upaya memajukan penelitian dan inovasi di tingkat daerah. Sejumlah 50 peserta termasuk pengurus Badan Riset dan Teknologi (Britek), pengurus Kadin Jawa Barat, perwakilan Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi (BRIN), Anggota Luar Biasa Kadin Jawa Barat, dan Perusahaan anggota Kadin berdomisili di Jawa Barat turut ambil bagian dalam forum ini.

Sinergi Daerah bersama Kadin Jawa Barat tersebut menghadirkan sesi dialog mendalam yang melibatkan langsung Kepala Badan Riset dan Teknologi Kadin Indonesia Ilham Habibie, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BRIN Yudi Widyanto, Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara, dan sejumlah pengurus Kadin Jawa Barat. Dialog ini membahas mengenai upaya pembangunan ekosistem penelitian dan inovasi yang didasarkan pada tata kelola lembaga riset yang efisien.

(lanjutan di halaman 20)



Kepala Badan Riset dan Teknologi Kadin Indonesia, Ilham A Habibie, mengatakan inovasi teknologi harus menjadi perhatian mengingat sumber teknologi di Indonesia masih didominasi produk luar negeri. Sependapat dengan Ilham, Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara, beranggapan, sudah seharusnya Indonesia khususnya Jawa Barat bisa menciptakan teknologi sendiri untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

Sebagai tambahan, sepanjang pertemuan ini berlangsung, para pengurus Kadin Jawa Barat juga telah memberikan penjelasan mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam bidang riset dan teknologi, khususnya yang relevan dengan wilayah setempat.

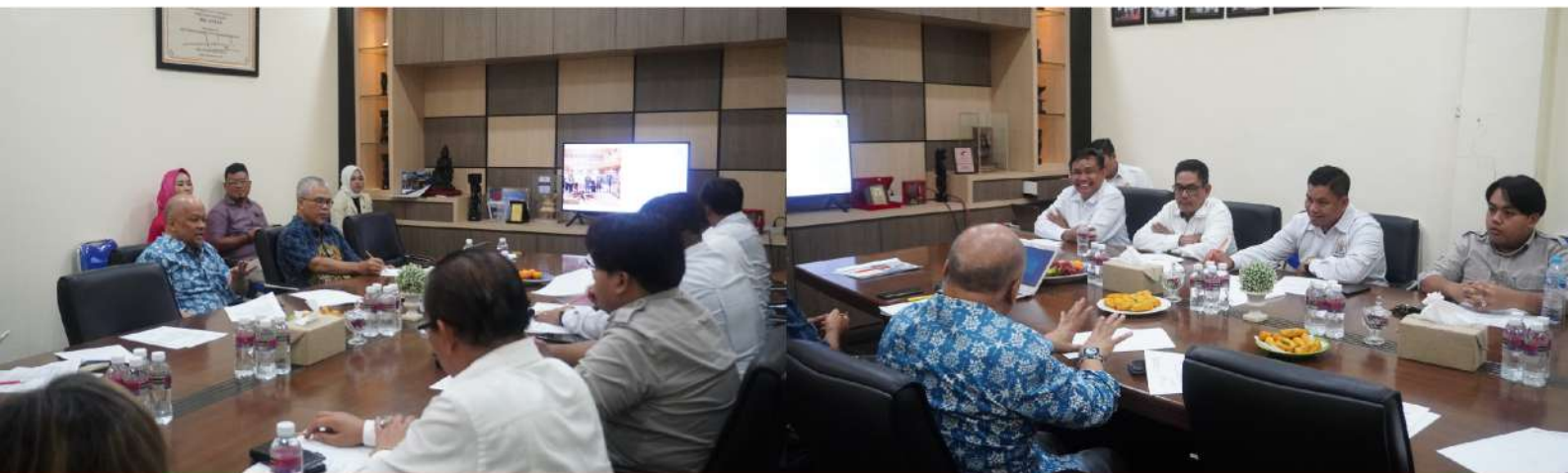
BRITEK Kadin Indonesia Lakukan Sinergi dengan Kadin Kep. Riau



Selain di Jawa Barat, program sinergi daerah juga dilakukan di Kepulauan Riau. Kadin Indonesia mengadakan Dialog Riset dan Teknologi dengan tema "Membangun Ekosistem Penelitian dan Inovasi Melalui Tata Kelola Lembaga Riset yang Baik" pada 30 Oktober 2023 di Kantor Kadin Kepulauan Riau.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Riset dan Teknologi Kadin Indonesia Ilham A. Habibie, Koordinator Fungsi Penelitian Indikator dan Pengukuran Riset dan Inovasi Direktorat PIRTI Dr. Yudi Widayanto, serta seluruh jajaran Kadin Kepulauan Riau.

Melalui dialog ini, Kadin Indonesia yakin kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam mengangkat riset dan inovasi di Indonesia ke level yang lebih tinggi, berkontribusi pada kemajuan negara, serta mendorong daya saing industri nasional.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Upaya Dorong Pemanfaatan Drone untuk Pengembangan Kawasan



Drone atau pesawat tanpa awak merujuk pada seperangkat kamera (*payload*) yang mampu menghasilkan foto udara yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan lebih lanjut. Hingga saat ini, *drone* semakin banyak digunakan sebagai instrumen pengambil data, salah satunya dalam pengambilan data udara untuk kepentingan pengembangan kawasan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), *drone mapping* merupakan metode baru yang menjadi sebuah solusi dalam menjawab kebutuhan pemetaan. Teknik pemetaan dengan *drone* ini mampu menyajikan data spasial dengan akurasi tinggi untuk berbagai keperluan pemetaan yang memungkinkan pengambilan data pengukuran topografi dengan kualitas yang sama dengan pengukuran secara terestrial akan tetapi dalam waktu yang relatif lebih singkat.

Dalam rangka menjajaki potensi kerja sama yang potensial, Kadin Indonesia melangsungkan pertemuan dengan perusahaan teknologi Malaysia Vision Unmanned System (Malvus) Sense Sdn. Bhd. pada 12 dan 13 Oktober 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia. Perusahaan Malvus diinisiasi oleh sekelompok insinyur dan pengusaha Malaysia dengan visi mengembangkan jaringan sensor cerdas yang dapat memantau berbagai aspek kehidupan perkotaan, seperti arus lalu lintas, kualitas udara, dan konsumsi energi.

Wakil Ketua Komite Tetap Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Sayid Fadhil, bersama dengan Wakil Ketua Komite Tetap Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Sayid Andi Maulana, hadir langsung dalam pertemuan ini mewakili Kadin Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk mengulik lebih jauh mengenai pemanfaatan teknologi *drone* dalam pengumpulan data udara untuk dapat memberikan interpretasi data yang akurat untuk keperluan pengembangan kawasan.

Pertemuan ini juga bertujuan untuk menjajaki peluang kerja sama antara Kadin Indonesia, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kementerian/Lembaga, serta perusahaan-perusahaan komoditas yang memiliki lahan luas, industri perminyakan, hingga industri lain yang terkait.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Dukung Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Perdagangan Crude Palm Oil, Kadin Indonesia Adakan Sosialisasi Peraturan Bappebti No. 7/2023

Kementerian Perdagangan menetapkan Crude Palm Oil (CPO) merupakan komoditas strategis Indonesia. Tercatat pada 2022, produksi CPO Indonesia mencapai 46,73 juta ton dengan nilai ekspor mencapai USD 29,62 miliar. Pada Mei 2023, produksi CPO Indonesia tercatat 20,86 juta ton atau lebih tinggi 15,74 juta ton dibanding Malaysia. Tingginya produksi ini menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar dunia kelapa sawit.

Dengan posisi strategis tersebut, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola perdagangan CPO Indonesia yang ditandai dengan diterbitkannya peraturan Bappebti (Perba) No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka, walaupun kebijakan ini bersifat sukarela (*voluntary*).

Mengutip pemberitaan publik yang dilansir Medcom.id (15/10), Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan kebijakan ini dipastikan akan mendukung Indonesia menjadi barometer harga CPO dunia dan merupakan sebuah usaha bersama untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dan perdagangan CPO bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai respons terhadap diluncurkannya regulasi ini, Kadin Indonesia mengadakan sosialisasi Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2023 pada 10 Oktober 2023. Sosialisasi ini menghadirkan langsung WKU Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, Ketua Komite Tetap Kebijakan dan Data Pertanian Harry Hanawi, dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko.

Pertemuan ini secara dua arah membahas mengenai ketentuan umum perdagangan fisik CPO yang bersifat *voluntary* untuk membentuk harga acuan yang lebih bersaing untuk dijadikan *price reference* dan data transparansi penjualan CPO. Dengan kolaborasi sinergis dari seluruh pemangku kepentingan, Perba ini dapat terlaksana dengan baik agar Bursa CPO Indonesia dapat menjadi harga acuan dan mendukung Indonesia menjadi *market influencer* di pasar global.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

UU Cipta Kerja Mendorong Penanaman Modal Asing dan Kemudahan Berusaha

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan laporan analisis dari World Bank yang tercantum dalam publikasi Indonesia Economic Prospect (IEP) pada Desember 2022, total realisasi PMA meningkat sebesar rata-rata 29,4 persen dalam lima triwulan setelah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diberlakukan.

Sebagai upaya konkret dalam menghadirkan kemudahan berusaha sebagaimana diamanatkan oleh UU Cipta Kerja, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Undang-undang (UU) Cipta Kerja bersama Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar rapat konsolidasi bertajuk "Implementasi UU Cipta Kerja bagi PJK dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Mendukung Kemudahan Berusaha" di Grand Mercure Kemayoran pada 12 Oktober 2023. Kadin Indonesia, sebagai mitra strategis pemerintah dan payung utama organisasi bisnis di Indonesia, ikut serta dalam mendukung inisiatif pemerintah dengan hadir dalam rapat tersebut.



UU Cipta Kerja menghadirkan fasilitas pinjaman bank tanpa perlu mengurus Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), melainkan hanya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan penyederhanaan akses ini, kini individu maupun UMKM dapat lebih mudah mengajukan pinjaman. Pengusaha perorangan bahkan dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya dengan memiliki NIB, sementara usaha super mikro perlu menunjukkan sertifikasi kompetensi atau surat keterangan dari rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW).

(lanjutan di halaman 24)



Prosedur pengajuan KUR menjadi jauh lebih sederhana, sesuai dengan moto "KUR mudah dan murah". Kemudahan di sini mengacu pada persyaratan yang diperlukan bagi penerima KUR, sementara murah mengacu pada suku bunga KUR yang rendah, berkisar antara 3-6 persen, tergantung pada ukuran usaha. Peraturan pengajuan KUR diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Syarat Pembiayaan melalui Bank Hanya Menggunakan NIB.

Meskipun perbankan menyambut baik penerapan aturan ini, perlu dilakukan penyesuaian oleh kementerian/lembaga teknis karena saat ini OJK hanya mengatur penerapan aturan tersebut untuk usaha berbadan hukum perseorangan.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Penyusunan Blueprint: Langkah Konkret Optimalkan Sinergi BUMN-Swasta

Sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi antara BUMN dan Swasta, Kadin Indonesia dan Kementerian BUMN menggelar Forum Sinergi BUMN-Swasta dengan tema "Kolaborasi untuk Pembangunan Inklusif" pada 14 Agustus 2023 di Grand Ballroom, Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta.

Sebagai tindak lanjut dari forum tersebut, Kadin Indonesia bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggagas cetak biru (*blueprint*) Sinergi BUMN-Swasta, yang akan menjadi panduan bagi kerja sama yang lebih optimal dan efisien.

Blueprint ini memiliki tujuan untuk mendorong pemerintah agar lebih proaktif dalam mengembangkan kebijakan pro-bisnis, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan BUMN, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi perusahaan swasta.

Pada 11 Oktober 2023, diadakan Rapat Penyusunan Blueprint Sinergi BUMN-Swasta di Wisma Baja/Wisma Krakatau Steel. Pertemuan ini dihadiri oleh WKU Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Herman Heru Suprobo, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Akbar Djohan, serta Wakil Direktur Eksekutif I SKI Mercy Simorangkir. Hasil dari pertemuan ini adalah pembuatan kerangka Blueprint Sinergi BUMN-Swasta.

(lanjutan di halaman 25)



Blueprint ini mencerminkan semangat kerja sama serta kolaborasi konkret antara BUMN dan sektor swasta, yang memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan positif dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Inisiatif ini adalah sebuah langkah konkret kedua pihak menuju masa depan yang lebih inklusif, di mana BUMN dan sektor swasta dapat bersama-sama memajukan bangsa ini melalui kerja sama yang kuat dan berkesinambungan. Dengan adanya *blueprint* ini, nantinya BUMN-Swasta dapat memiliki panduan yang jelas menuju kemajuan bersama, yang tidak hanya bermanfaat bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Dukungan Penuh RPJMN 2025-2029, Kadin Indonesia Perkuat Dialog dengan Bappenas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan lima tahun pertama dari periode pelaksanaan RPJPN 2025-2045. Oleh karena itu, dalam lima tahun mendatang, penting bagi Indonesia untuk mengatur strategi dan melakukan penataan kembali langkah-langkah demi tercapainya pendapatan perkapita Indonesia yang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*).

Kadin Indonesia terus menunjukkan dukungannya terhadap RPJMN 2025-2029. Salah satu cara yang dilakukan yaitu melalui agenda audiensi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada 18 Oktober 2023. WKU Bidang PPN, Herman Heru Suprobo, hadir dalam audiensi tersebut didampingi oleh Ketua Komite Tetap Koordinasi Asosiasi Jasa Konstruksi dan Properti Peter Frans, Ketua Komite Tetap Keanggotaan dan Pemberdayaan Asosiasi Frans Buce Pangaribuan, dan Anggota Pokja Stunting Sanverandy H. Kusuma.



Agenda rapat tersebut secara interaktif membahas mengenai rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan Bappenas terkait Major Project RPJMN 2025-2029. Penandatanganan MoU ini rencananya akan dilaksanakan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Asosiasi 21 November 2023 mendatang.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Sumatra Barat: Keindahan Alam, Potensi Ekonomi, dan Dukungan Kadin Indonesia

Sumatra Barat menawarkan banyak destinasi wisata yang menakjubkan. Pemerintah daerah juga telah menetapkan target peningkatan kunjungan wisata, yang diharapkan akan mendongkrak perekonomian masyarakat. Target jumlah kunjungan hingga akhir tahun 2023 ditetapkan sebanyak 8,2 juta kunjungan.

Selama periode Januari-Juli 2023, jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatra Barat (Sumbar) mencapai 6,59 juta orang. Dari data tersebut, kunjungan wisatawan domestik masih mendominasi dengan 6.570.770 kunjungan, sementara kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 28.681 kunjungan.

Selain pesona alamnya, Sumatra Barat memiliki potensi besar dalam industri kreatif yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dalam upaya untuk terus mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dukungan yang kuat dari pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci.



Kadin Indonesia turut memberikan dukungan dengan mengadakan pertemuan dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, pada 26 Oktober 2023. Pertemuan ini dihadiri oleh WKU Bidang Parekraf Triawan Munaf, Ketua Komite Tetap Pengembangan Iklim Usaha Investasi B.M. Koesoemawardhana, dan Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Potensi Daerah Bidang Investasi Indira Sofwan, yang membahas potensi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Datar, Sumatra Barat. Bupati Tanah Datar menekankan pentingnya pembangunan hotel di daerahnya, mengingat keterbatasan jumlah hotel dan *homestay* yang tersedia, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan industri kreatif di Sumatera Barat, khususnya di Tanah Datar.

Pemerintah Sumatra Barat juga telah menetapkan tahun 2023 sebagai tahun kunjungan wisata ke Sumatra Barat, yang akan diwarnai dengan Festival Pesona Minangkabau pada tanggal 7-10 Desember 2023. Festival ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keindahan pariwisata dan potensi industri kreatif yang dimiliki oleh Suku Minangkabau.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI

Kadin Indonesia Jajaki Kolaborasi dengan Perusahaan ICT Terbesar Hingga Konsultan Manajemen untuk Pengembangan Ekosistem Keamanan Siber

Kondisi keamanan siber di Indonesia masih memerlukan perhatian khusus. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, Indonesia mengalami sekitar 3.000 serangan siber per hari selama tahun 2023, dimana jumlah ini terbilang meningkat dari tahun sebelumnya.

Kolaborasi Kadin Indonesia dengan Google Indonesia untuk Meningkatkan Keamanan Siber

Dalam upaya mewujudkan keamanan siber di Indonesia, WKU Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia Firlie H. Ganinduto, Ketua Komisi Teknologi Perangkat Komunikasi & Informatika Parlin Pasaribu, dan Ketua Komisi Jaringan Informatika Jamalul Izza telah mengadakan pertemuan strategis dengan perwakilan dari Google Indonesia pada 5 Oktober 2023. Pertemuan ini menjadi sebuah langkah penting dalam menggarisbawahi kolaborasi yang erat antara sektor swasta dan perusahaan teknologi global dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Google Indonesia memaparkan rencana program mereka hingga akhir tahun 2023 yang terkait erat dengan keamanan siber untuk tahun mendatang. Perusahaan teknologi raksasa ini menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program kerja yang dicanangkan oleh Kadin Indonesia. Hal ini mencakup inisiatif-inisiatif yang akan memperkuat infrastruktur keamanan siber di Indonesia, serta memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang ancaman siber di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis.

Selain itu, keseriusan Kadin Indonesia untuk mengembangkan isu keamanan siber juga terlihat dari beberapa penajakan potensi kolaborasi dengan AT Kearney dan Thales.

Kadin Indonesia Gandeng AT Kearney, Fokus Bahas Blueprint Keamanan Siber

WKU Bidang Kominfo Firlie H. Ganinduto, Wakil Ketua Komite Tetap Penelitian Aplikasi Riyanto Gozali, dan Wakil Direktur Eksekutif (DE) I Sekretariat Kadin Indonesia (SKI) Mercy Simorangkir, berdiskusi secara langsung mengenai rencana penyusunan blueprint cyber security di Indonesia bersama perusahaan konsultan manajemen, AT Kearney pada 16 Oktober 2023. WKU Bidang Kominfo, Firlie H. Ganinduto, menekankan pentingnya implementasi gagasan ini dengan menitikberatkan pada pengukuran dampak sebelum dan sesudah diterbitkannya blueprint tersebut. Selain itu, Firlie juga menekankan kebutuhan akan pembicara yang relevan dengan konteks kondisi keamanan siber Indonesia.

(lanjutan di halaman 28)

Jajaki Kolaborasi dengan Thales, Dorong Penguatan Keamanan Siber

Sementara itu, dalam rangka menjajaki peluang kolaborasi meningkatkan keamanan siber, Kadin Indonesia melaksanakan pertemuan dengan perusahaan industri strategis di bidang pertahanan, digital, dan teknologi asal Prancis, Thales, pada 16 Oktober 2023.

WKU Bidang Kominfo, Firlie H. Ganinduto, dan Wakil DE I SKI, Mercy Simorangkir, untuk membahas rencana penyelenggaraan Innovation Day 2024 oleh Thales yang pada periode ini membawa tema utama "Cybersecurity and Aerospace". Terkait gelaran ini, Thales menginginkan adanya keterlibatan dan kolaborasi dari Kadin Indonesia.

Bersama AIBP, Kadin Indonesia Kembangkan Industri Keamanan Siber dan Ciptakan Peluang Bisnis



Tidak hanya menjalin kerja sama dengan perusahaan internasional, tetapi Kadin Indonesia juga bekerja sama dengan salah satu unit usaha dari Industry Platform, sebuah firma konsultan yang berbasis di Singapura yaitu ASEAN Innovation Business Platform (AIBP). Pada 23 Oktober 2023, Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia mengadakan acara "Kadin x AIBP: Cyber Security Networking and Immersion for Indonesia and Singapore" yang bertujuan untuk mengembangkan industri keamanan siber dan menciptakan peluang bisnis serta kemitraan di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh WKU Bidang Kominfo Firlie H. Ganinduto, Ketua Komite Tetap Perangkat Teknologi Komunikasi dan Informatika Parlin Pasaribu, Ketua Komite Tetap Aplikasi Teknologi Komunikasi dan Informatika Noudhy Valdryno, Wakil Ketua Komite Tetap Implementasi dan Akselerasi Prakarsa Baru Rorian Patryaksa, Wakil Ketua Komite Tetap Penyerapan Aspirasi Pelaku Industri Sunu Widyatmoko, Wakil Ketua Komite Tetap Penelitian Aplikasi Permadhi, Riyanto Gozali, Cisco Systems, MDI Ventures, Pos Indonesia, Astra Financial, Dana Indonesia, dan DtechCorp.



INISIATIF INTERNAL

Dorong Literasi Keuangan yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kadin Indonesia dan BEI Adakan Webinar untuk Edukasi Masyarakat

Saat ini, Indonesia mempunyai tantangan yang besar dalam bidang literasi digital. Dengan total populasi penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta orang yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau masih memiliki indeks literasi di bawah 50 persen pada tahun 2022. Ditambah dengan perkembangan era digital yang terjadi saat ini di mana pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 200 juta orang, namun tidak disertai dengan literasi digital yang baik.

Hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan perkembangan positif, dengan indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 49,68 persen meningkat signifikan dari angka 38,03 persen pada tahun 2019. Meskipun terdapat peningkatan, masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik dan peraturan berbagai produk serta layanan di sektor jasa keuangan.

Dalam rangka mendukung peningkatan literasi keuangan, pada 3 Oktober 2023, Badan Keuangan dan Moneter Jakarta (BKMJK) menggelar webinar berjudul "the Road to Go Public" di Menara Kadin Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari program kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam upaya meningkatkan edukasi serta literasi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan pada para pelaku usaha.

Webinar ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala BKMJK Kadin Indonesia Tigor M. Siahaan, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman, dan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Gede Nyoman Yetna, serta dihadiri oleh pengurus BKMJK, pengurus bidang/badan lainnya, Kadin DKI, Kadin Banten, Kadin Jateng, baik secara langsung maupun daring.

Webinar ini membahas sejumlah topik penting, termasuk pembaruan pasar sekuritas, proses dan strategi perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya, serta kisah sukses *go public*. Melalui webinar ini, Kadin Indonesia dan BEI berupaya untuk mengatasi tantangan literasi keuangan yang dihadapi Indonesia dan memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang memadai dalam menghadapi dunia keuangan yang semakin kompleks dan digital.



KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kolaborasi Strategis Indonesia-Etiopia dalam Memperkuat Hubungan Ekonomi Bilateral

Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Menurut data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), Indonesia tercatat sebagai negara penghasil kopi terbesar ke-3 dunia pada periode 2022/2023, dengan memproduksi kopi sebanyak 11,85 juta kantong

Sementara itu, berdasarkan data USDA pada periode yang sama, Etiopia merupakan produsen kopi terbesar di benua Afrika. Kolaborasi antara kedua negara ini menjadi penting karena keduanya memiliki peran signifikan dalam menyokong pasokan kopi global.

Belum lama ini, Indonesia dan Etiopia sepakat untuk bersama-sama mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam ekspor kopi ke seluruh dunia. Sebagai negara-negara produsen kopi, langkah ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat kerja sama di antara keduanya.



Dalam konteks ekspor dan perluasan pasar, Kementerian Perdagangan Indonesia aktif berupaya untuk mendorong ekspor produk-produk unggulan negara. Salah satu upaya konkret adalah penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI), yang menjadi ajang penting bagi pelaku bisnis Indonesia untuk memasarkan produk-produk mereka ke pasar global.

Mendekati acara besar TEI pada tanggal 12 Oktober 2023, WKU Bidang Hubungan Internasional, Bernardino M. Vega, menerima kunjungan istimewa dari Duta Besar Etiopia bersama 25 delegasi yang akan berpartisipasi dalam TEI.

Dalam kesempatan ini, Kadin Indonesia mengusulkan pertemuan dengan delegasi Etiopia untuk membahas Preferential Trade Agreement (PTA) dengan tujuan merinci barang-barang atau material yang akan ditawarkan atau diterima sesuai dengan preferensi yang telah disepakati oleh kedua negara. Di samping itu, rapat tersebut juga mempertimbangkan pembaharuan dan penyegaran Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua Chamber of Commerce and Industry sebagai tanda komitmen mereka dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral.

Ini adalah langkah konkret menuju meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Etiopia, yang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi kedua negara serta memperkuat posisi mereka dalam dunia perdagangan kopi global.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

INA-LAC Business Forum 2023: Siap Tingkatkan Konektivitas Bisnis RI-Amerika Latin dan Karibia



Hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Latin dan Karibia terus menunjukkan geliat pertumbuhan mengingat kawasan ini merupakan pasar non-tradisional bagi Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI mencatat, dalam lima tahun terakhir, total perdagangan antara Indonesia dan Amerika Latin serta Karibia meningkat sebesar 8,9 persen dengan nilai perdagangan mencapai USD 111,16 miliar pada tahun 2022.

Kian serius menggarap peluang kerja sama ekonomi ke pasar prospektif ini, Kadin Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri menggelar Indonesia-Latin America and Caribbean Business Forum (INA-LAC) pada 16-17 Oktober 2023. Forum bisnis yang berlokasi di Ritz Carlton Hotel ini menjadi wadah para pelaku bisnis di Indonesia dan negara Amerika Latin dan Karibia untuk bertukar informasi dan memperdalam hubungan bisnis antarnegara.



Pada hari pertama gelaran ini, Kadin Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Dewan Bisnis Meksiko untuk Perdagangan Luar Negeri, Investasi, dan Teknologi (COMCE) yang dilakukan langsung oleh WKU Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, dengan Chairman of the Mexico Business Council for Foreign Trade, Investment and Technology, Stephane Michel. MoU ini bertujuan untuk melanjutkan dan membentuk kerangka pengembangan hubungan bisnis yang lebih kuat guna mendukung iklim investasi di Meksiko dan Indonesia.

(lanjutan di halaman 32)



WKU Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, menjelaskan keterlibatan badan usaha dalam INA-LAC 2023 merupakan tanda yang jelas adanya keinginan kuat untuk mengikuti perkembangan dunia usaha saat ini. "Setiap negara Amerika Latin dan Karibia memiliki banyak peluang sehingga perlu untuk melihat lebih banyak peluang investasi dari kawasan ini serta indikasi minat dari dunia usaha di Indonesia," tambah Shinta.

INA-LAC Business Network 2023

Sebagai wujud konkret penguatan relasi bisnis antara Indonesia dengan Amerika Latin dan Karibia, turut dilaksanakan pula gelaran INA-LAC Business Network 2023 pada 17 Oktober 2023. INA-LAC Business Network merupakan platform untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Latin dan Karibia.

Secara teknis, platform ini terbuka bagi asosiasi dan perorangan yang ingin membangun kerja sama antara Indonesia dan negara-negara di Amerika Latin dan Karibia. Hadirnya platform ini juga sekaligus sebagai upaya mendorong dialog dan kerja sama antarsektor usaha, khususnya di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi.

Lebih lanjut, tahun ini telah ditandatangani tiga pernyataan kehendak untuk bergabung dalam Business Network, yang salah satunya dilakukan antara Kadin Indonesia dan Entrepreneurs of Manta, Kadin Indonesia dan Chamber of Commerce of Manta, serta Kadin Indonesia dengan Jamaica Chamber of Commerce. Dengan demikian, tercatat sudah 23 asosiasi yang bergabung dalam INA-LAC Business Network.



KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) 2023: Perkuat Kerja Sama Dagang dan Investasi dengan Eropa

Uni Eropa tercatat sebagai mitra ekonomi yang penting bagi Indonesia. Hal ini diperkuat melalui data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyebutkan total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa pada 2022 telah mencapai USD 33,16 miliar.

Melihat rekam jejak perdagangan yang strategis ini, Kementerian Luar Negeri dan Kadin Indonesia berkolaborasi untuk menyelenggarakan Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) 2023 pada 17-18 Oktober 2023. Gelaran IEBF 2023 mengangkat tema "Optimizing Indonesia-Europe Business Opportunity to Support Sustainable and Inclusive Economic Development".

Forum bisnis ini memiliki fokus utama untuk memperkuat kemitraan antara Indonesia dan negara-negara Eropa sekaligus mempertemukan pelaku bisnis, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait antarkedua negara.

Mengacu pada keterangan dari Kementerian Luar Negeri, Eropa merupakan salah satu sumber investasi dan teknologi dalam mendukung upaya Indonesia meningkatkan kapasitas industri dan industri hilir, menerapkan keberlanjutan, serta memajukan kreativitas dan inovasi.

Uni Eropa juga merupakan mitra pembangunan Indonesia dan investor potensial untuk pelaksanaan peralihan ke ekonomi hijau dan pengembangan kerja sama strategis seperti infrastruktur dan critical technology.



Oleh sebab itu, gelaran IEBF tahun ini fokus terhadap lima sektor prioritas, yaitu komponen mesin dan elektronik, industri kreatif, transisi energi, ekonomi digital dan infrastruktur kesehatan. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi dan Wku Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, hadir mewakili Kadin Indonesia dalam forum bisnis yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

(lanjutan di halaman 34)



WKU Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia menduduki peringkat lima sebagai negara pengekspor dengan nilai dagang mencapai USD 24 juta sehingga ajang IEBF diharapkan dapat membuka peluang peningkatan nilai ekspor.

Gelaran IEBF juga menjadi saksi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dengan Danish-Indonesian Business Chamber dan Lithuanian Chamber of Commerce, Industry and Craft. Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, Kadin Indonesia akan melaksanakan kerja sama dengan kedua lembaga tersebut dalam rangka meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertukaran informasi bisnis.

Total Perdagangan

Total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa pada tahun 2022 mencapai

USD 33,16 miliar



Ekspor Indonesia
ke Uni Eropa mencapai

USD 22,9 M



Impor Indonesia
dari Uni Eropa mencapai

USD 10,2 M

5 Komoditas Unggulan Uni Eropa:



Anggur
dan Wine



Keju



Gandum



Kendaraan



Minyak
Zaitun

Sektor Potensial Uni Eropa



Industri Hijau
(green industry)



Energi
Terbarukan



Transportasi

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kadin Indonesia dan Arab Saudi Perkuat Hubungan Dagang melalui Roundtable Meeting

Kinerja perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi terus meningkat dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dalam acara Saudi-Indonesian Roundtable Meeting Kadin Indonesia dan Federation of Saudi Chambers (FSC) yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi, pada 19 Oktober 2023.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Investasi Kerajaan Arab Saudi Khalid Al Falih, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia Erick Thohir, dan Ketua Komite Tetap Timur Tengah Kadin Indonesia Mohamad Bawazeer.



Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pada tahun 2022, total perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD 7,51 miliar, mengalami peningkatan sebesar 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, dalam lima tahun terakhir (2018-2022), Zulkifli mengungkapkan bahwa nilai perdagangan kedua negara terus tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 5 persen. Dengan demikian, terdapat peluang yang besar bagi kedua negara untuk terus memanfaatkan potensi yang ada.

Zulkifli menjelaskan bahwa saat ini Indonesia tengah berupaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yang mencakup pembangunan infrastruktur yang komprehensif di seluruh Indonesia. Sama halnya, Arab Saudi sedang berusaha mencapai Visi Saudi 2030 yang bertujuan membangun ekonomi yang dinamis dan beragam serta berkolaborasi dengan pengusaha Indonesia untuk menciptakan peluang bisnis baru.

(lanjutan di halaman 36)





Pertemuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan investasi kedua negara, khususnya di sektor infrastruktur, energi, haji dan umrah, perbankan, kesehatan, serta pertanian dan migas.

Salah satu bentuk kerja sama peningkatan investasi dalam forum ini diwujudkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) di sektor infrastruktur dan energi, yang ditandatangani oleh Kadin Indonesia - Federation of Saudi Chambers (FSC) dan ACWA Power - PT Pertamina International EP.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

Kerja Sama Kadin Indonesia dan Pemerintah Kota Pariaman: Memajukan Dunia Kerja melalui Program Magang Ground Handling

Industri penerbangan adalah salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang pesat di Indonesia. Data Angkasa Pura I dan II yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penumpang pesawat di lima bandara utama di Indonesia sepanjang 2022 mencapai 36,02 juta orang. Angka itu melampaui capaian di tahun 2020 (19,52 juta orang), dan 2021 (15,99 juta orang). Ini menandakan industri penerbangan mulai pulih setelah dihantam pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) sejak Maret 2020.

Lima bandara yang dimaksud adalah Bandara Kualanamu (Sumatra Utara), Soekarno-Hatta (Banten), Juanda (Jawa Timur), Ngurah Rai (Bali), dan Sultan Hasanuddin (Sulawesi Selatan).



Pariaman, sebuah kota yang terletak di Sumatera Barat, memiliki potensi besar dalam hal pengembangan infrastruktur dan layanan penerbangan. Dalam upaya menciptakan kesempatan berkarir bagi generasi muda di daerah tersebut, Pemerintah Kota Pariaman bersama dengan Kadin Indonesia dalam Program Magang Ground Handling. Program ini bertujuan untuk melatih calon tenaga kerja penerbangan yang kompeten dan terampil dalam operasi darat pesawat terbang.

(lanjutan di halaman 37)



Pada 2 Oktober 2023, WKU Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz, Ketua Komite Tetap Pelatihan Vokasi Wisnu Wibowo, Ketua Komite Tetap Kerja Sama Kementerian/Lembaga & Industri Sari Pramono, dan Wakil Ketua Komite Tetap Transformasi & Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dendi Pratama, menerima undangan untuk menghadiri audiensi yang diadakan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

Audiensi ini bertujuan untuk membahas Program Magang Ground Handling, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dengan Kadin Indonesia Bidang Vokasi dan Pelatihan, mengenai pelaksanaan kerja sama terkait Pemagangan Dalam Negeri dan Pemagangan Luar Negeri, khususnya melalui Program Magang Ground Handling.

MoU ini ditandatangani oleh Wali Kota Pariaman, Genius Umar, dan WKU Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia, Adi Mahfudz dan disaksikan oleh jajaran Kadin Indonesia serta rombongan Pemerintah Kota Pariaman.

Pemko Pariaman telah mengirim para pemuda dan pemudi asal Kota Pariaman untuk mengikuti berbagai pelatihan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. "Dengan mengikuti pelatihan, mereka akan memiliki ilmu khusus sehingga mereka nantinya bergabung di dunia usaha dan industri," ujar Genius Umar.

Di kesempatan yang sama, WKU Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia, menyambut baik kedatangan rombongan dari Pemerintah Kota Pariaman. "Tidak banyak daerah yang mempunyai visi dan program seperti Pemko Pariaman, untuk itu kami mengapresiasi langkah pak wali, dalam upaya mengurangi angka pengangguran, menciptakan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Kadin Indonesia telah mengeluarkan platform "Kadin for Naker" sebagai wujud komitmen dalam menjawab tiga pondasi utama yang sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja Indonesia. Platform ini dirancang untuk memberikan manfaat kepada berbagai segmen tenaga kerja, termasuk tenaga kerja baru yang masih aktif mencari pekerjaan, tenaga kerja yang membutuhkan peningkatan kemampuan (*upskilling*), dan mereka yang ingin menggali keterampilan baru (*reskilling*).

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

Kadin Indonesia Bekerja Sama dengan BPJPH untuk Dukung Industri dan Produk Halal

Pada 2 Oktober 2023, WKU Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz, Ketua Komite Tetap Menciptakan pelaku ekonomi yang berdaya saing dan kredibel dalam industri dan produk halal adalah penting untuk memastikan bahwa produk halal Indonesia dapat diterima dan diakui di pasar global. Hal ini juga merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri halal di dalam negeri serta menjaga reputasi Indonesia sebagai produsen produk halal yang terkemuka.

The State of the Global Islamic Economy Report 2022 mengungkapkan bahwa indikator ekonomi syariah Indonesia terus membaik, di mana Indonesia berhasil menjadi peringkat ke-4 di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara konsumen produk halal terbesar di dunia yang mencakup 11,34 persen dari pengeluaran halal global.

Dalam upaya untuk terus memperkuat industri dan produk halal di Indonesia, Kepala Badan Ekonomi Syariah, Taufan E.N. Rotorasiko, menandatangani MoU antara Kadin Indonesia dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diwakilkan oleh Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, pada 25 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).

Nota Kesepahaman ini mencakup berbagai aspek kerja sama, di antaranya pengembangan industri dan produk halal, pengembangan sumber daya manusia dalam bidang jaminan produk halal, penyelenggaraan advokasi, edukasi, literasi, dan layanan informasi, serta kerja sama dalam pertukaran data dan informasi untuk percepatan proses sertifikasi halal. Langkah ini bertujuan menciptakan pelaku ekonomi yang memiliki daya saing dan kredibilitas tinggi dalam industri dan produk halal, serta menjaga citra Indonesia sebagai produsen produk halal yang unggul di pasar global.



PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

Kadin Indonesia Tandatangani MoU dengan Lemhannas



Kadin Indonesia dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sama-sama memainkan peranan penting dalam usaha menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, Lemhannas bertugas membantu presiden salah satunya dalam pengkajian permasalahan strategi nasional, regional, hingga internasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Di sisi lain, Kadin Indonesia memiliki peranan membangun Indonesia melalui kontribusi para pelaku usaha.



Dalam upaya memperkuat hubungan penegakan hukum, pertahanan, dan keamanan, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan antarkedua lembaga, Kadin Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Lemhannas terkait Penyelenggaraan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kadin Indonesia pada 12 Oktober 2023.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, Kepala Badan Gakkum Hankam Bambang Soesatyo, dan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, Kadin Indonesia dapat bersinergi dengan Lemhannas RI untuk menghasilkan kajian-kajian isu strategis seperti ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, hingga ketahanan ekonomi kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN).



Liputan Khusus

Kadin Indonesia Laporkan Kinerja 2023: Penguatan UMKM dan Kerja Sama Internasional untuk Dukung Perekonomian Nasional

Sebagai wadah bagi dunia usaha sekaligus mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia melaporkan kinerjanya selama 2023 dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui serangkaian program kerja dan kolaborasi lintas sektor, Kadin Indonesia telah mendorong penggunaan produk dalam negeri, memfasilitasi ekspor dan kerja sama internasional, serta mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan di Indonesia.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan sejak Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2022, Kadin Indonesia menetapkan sejumlah program kerja sebagai fokus organisasi. "Kadin Indonesia berkomitmen untuk memberikan dampak yang signifikan melalui serangkaian program kerja yang telah ditetapkan pada Rapimnas 2022, termasuk UMKM naik kelas, peningkatan kolaborasi internasional serta penguatan organisasi," kata Yukki.

Hingga saat ini, Kadin Indonesia telah berhasil menjalankan sejumlah program untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara nyata. Pameran Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023 yang digelar bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), contohnya, mendorong penggunaan produk produk dan jasa lokal melalui digitalisasi dan sistem pengadaan dengan e-katalog.

(lanjutan di halaman 41)

Selain itu, dengan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, Kadin menampilkan produk unggulan Indonesia sambil memfasilitasi pertemuan bisnis untuk menarik investasi dan mendorong ekspor. “Bahkan, melalui program WikiExport Jepang, Kadin telah menghubungkan lebih dari 200 UMKM dengan pelaku bisnis Jepang, dan menghasilkan ekspor senilai Rp 10 miliar pada Agustus lalu,” tambah Yukki.



Dalam ranah internasional, Kadin Indonesia telah mendukung gelaran ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) 2023 serta menjalankan *roadshow* guna memperkuat hubungan dan konektivitas antar negara ASEAN. Upaya tersebut telah menghasilkan langkah strategis yang berpengaruh pada peningkatan kualitas bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pemahaman perspektif regional dan global, pengarusutamaan isu bisnis, pemberdayaan bisnis lokal, hingga kolaborasi antar negara ASEAN. Begitu juga dalam hal keberlanjutan, Kadin Indonesia aktif berpartisipasi dalam gelaran Indonesia Sustainability Forum 2023 berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta terus mendorong dekarbonisasi industri lewat inisiatif Kadin Net Zero Hub.

Yukki menegaskan bahwa Kadin Indonesia sebagai organisasi juga terus bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan industri untuk terus memberikan manfaat bagi para anggotanya. Sejak disahkan secara hukum melalui UU No. 1 tahun 1987 dan diperkuat melalui Keppres No. 18 Tahun 2022, Kadin Indonesia terus berupaya untuk menguatkan konsolidasi internal organisasi sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia yang lahir berdasarkan Undang-Undang.

Selain itu, Kadin Indonesia juga terus bersinergi dengan para pelaku usaha daerah melalui Kadin Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia adalah melalui inisiatif Kadin Impact Award (KIA). Melalui ekosistem kompetisi, program KIA telah mendorong lahirnya program-program inovatif di bidang digitalisasi, pemberdayaan perempuan, vokasi, perekonomian daerah, dan keberlanjutan lingkungan yang memanfaatkan potensi ekonomi lokal.

Kinerja Kadin Indonesia ini tidak jauh dari upaya untuk meraih cita-cita Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan pemerintah untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*). Lebih jauh lagi, Kadin Indonesia juga telah menyerahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang diharapkan dapat menjadi panduan pemerintah untuk membawa Indonesia menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia berdasarkan pada produk domestik bruto (PDB) paritas daya beli (PPP) pada 2045.

(lanjutan di halaman 42)

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengapresiasi kinerja Kadin Indonesia melalui program-program yang telah dijalankan. "Peran Kadin Indonesia dan juga dunia usaha pada umumnya sangat strategis dalam menggalakkan investasi, mendorong ekspor, meningkatkan inovasi serta produktivitas, yang menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Faisal.

Ia berpendapat bahwa di samping aspek ekonomi, Kadin Indonesia juga perlu menguatkan perannya untuk memastikan diperhatikannya aspek lingkungan dan keberlanjutan, tanggung jawab sosial serta tata kelola yang baik. "Peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang telah diserahkan oleh Kadin Indonesia kepada pemerintah merupakan langkah awal yang sangat penting dan konkret untuk mendorong kolaborasi antara pengambil kebijakan dengan dunia usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama tersebut," tutur Faisal.

Dalam kesempatan ini, Yukki menegaskan kembali komitmen organisasi untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional dengan inisiatif yang inklusif dan kolaboratif. "Ke depan, organisasi akan terus meningkatkan kinerja kami lewat program-program yang memberikan manfaat tidak hanya untuk anggota Kadin, tetapi juga bagi seluruh stakeholders," tutup Yukki.

Kadin Indonesia Tegaskan Netralitas pada Pilpres 2024

Jelang pesta demokrasi 2024, Kadin Indonesia menegaskan sikap netral dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kadin tidak mendukung salah satu pasangan Capres.

Pelaksana Tugas Harian Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan posisi Kadin Indonesia tetap netral meskipun Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, dan Ketua Kadin Indonesia periode 2015-2020, Rosan Roeslani, memutuskan bergabung menjadi Ketua Tim Pemenangan masing-masing bacapres yang terdaftar.

Kadin Indonesia menegaskan senantiasa patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang ada. Para anggota Kadin di seluruh daerah juga diperbolehkan menjadi bagian dari tim pemenangan tanpa membawa identitas nama Kadin Indonesia.





Liputan Khusus

Kolaborasi Kadin Indonesia dan Kompas Gramedia Siap Kejar Target Penurunan Stunting di Indonesia

Kementerian Kesehatan melalui hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mengumumkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di 2022. Presiden RI, Joko Widodo, mendefinisikan stunting bukan hanya urusan tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis.



Pemerintah Indonesia menargetkan prevalensi stunting di angka 14 persen pada tahun 2024. Target penurunan ini terus dikejar oleh pemerintah melalui berbagai upaya, mulai dari penajaman, perbaikan cakupan dan kualitas intervensi spesifik dan sensitif, hingga perbaikan sistem pendataan dan pelaporan.

Mengingat stunting merupakan hal yang perlu diselesaikan bersama, pemerintah juga memastikan keterlibatan aktif berbagai lembaga non-pemerintah, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga filantropi, mitra pembangunan, dan lembaga swadaya masyarakat.

(lanjutan di halaman 44)

Oleh karena itu, Kadin Indonesia berkolaborasi bersama Kompas Gramedia melalui Tribun Network, untuk menginisiasi Gerakan Bersama Entaskan Stunting (BERES). Melalui gerakan ini, Kadin Indonesia menunjukkan dukungannya terhadap program prioritas pemerintah dalam pencegahan dan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Peresmian Gerakan BERES

Wujud kolaborasi gotong royong ini telah secara resmi diluncurkan pada 26 Oktober 2023 di Studio Kompas TV. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, dan Plh. Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, meresmikan langsung gerakan ini.



Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, memberikan apresiasi kepada Kadin Indonesia dan Kompas Gramedia atas komitmen dalam penekanan angka stunting. BERES dirancang untuk mencegah dan mengatasi stunting dengan cara memberikan makanan tambahan (PMT) kepada balita yang mengalami masalah penurunan berat badan, dan kekurangan gizi.

Mewakili Kadin Indonesia, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam memecahkan masalah stunting yang ada di Indonesia. Edukasi kepada semua lapisan masyarakat yang melibatkan asosiasi dan jaringan di seluruh Indonesia juga diperlukan untuk mempercepat penurunan stunting dan mengurangi kemiskinan ekstrem.

Acara peresmian ini juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila K.H. Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan BERES merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2030 dan jika momentum ini terlewatkan, Indonesia bisa terjebak dalam *middle income trap*.



Masih dalam agenda yang sama, Kadin Indonesia juga turut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kolaborasi antara Kadin Indonesia dengan lembaga pemerintah serta para pelaku swasta guna mendukung program BERES.

MADE ARIANDI
KETUA UMUM KADIN BALIKAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
BALI
JALAN MERAK NO. 1, KERTENING
JEMBRANG, GILIL, JEMBRANG
75124
BALI, INDONESIA

SPECIAL SECTION - KONSULTASI PELUANG INVESTASI IKN

Kadin Indonesia Gelar Konsultasi Peluang Investasi di IKN

Kadin Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkolaborasi untuk menggelar konsultasi publik mengenai peluang penanaman modal, insentif, dan kemudahan berusaha di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Melalui konsultasi peluang investasi yang diselenggarakan di Bali kali ini, Kadin Indonesia mengajak sekaligus memfasilitasi sektor swasta yang ingin berinvestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan pembangunan IKN membutuhkan dukungan investasi dari banyak pihak, termasuk sektor swasta dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan investasi dari pelaku usaha menjadi bagian penting dari skema pembangunan IKN.

“Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia mendukung investasi di IKN yang menjadi simbol pembangunan Indonesia Emas 2045 yang sejahtera, tangguh, inklusif dan berkelanjutan. IKN harus dibangun bersama dengan semangat gotong royong oleh seluruh komponen bangsa termasuk para pelaku usaha sektor swasta,” tutur Yukki.

Yukki melanjutkan, melalui kegiatan konsultasi publik ini, Kadin Indonesia berharap tingginya kesadaran pelaku usaha akan peluang dan fasilitas investasi di IKN sekaligus mendapatkan umpan balik dari para pelaku usaha guna mengoptimalkan regulasi penanaman modal dan kemudahan berusaha di IKN. “Komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung pembangunan IKN juga diwujudkan dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) IKN dalam penjajakan peluang investasi di IKN,” imbuh Yukki



Ketua Pokja IKN sekaligus Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin Indonesia, Budiarsa Sastrawinata, menegaskan sebagai wadah dunia usaha dan mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia siap membantu dan memfasilitasi pencarian investor guna membukukan target investasi untuk pembangunan IKN. "Kadin Indonesia juga berharap dapat menjadi penggerak industri dan sektor swasta untuk mengumpulkan beragam masukan dan inisiatif terkait regulasi investasi dan pembangunan IKN serta membantu penyelenggaraan *roadshow* untuk sosialisasi Pembangunan IKN," ujarnya.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Pembangunan IKN akan dilaksanakan dalam lima tahap selama periode 2020–2045. Pembangunan IKN tahap pertama masuk dalam proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp466 triliun. Terdapat tiga skema pendanaan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dari APBN sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp 123,2 triliun, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun.



Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara, Dr. Agung Wicaksono, menjelaskan sebagai ibu kota negara baru pertumbuhan ekonomi akan menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan Indonesia muncul sebagai negara maju yang diakui dunia. Sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045, diharapkan Indonesia saat itu telah lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*) dan melompat menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*).

"IKN dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, berkelanjutan dan berbasis teknologi. Pembangunan ibu kota baru yang berada di lokasi strategis ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih besar dan nantinya akan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi negara," tegasnya.

SPECIAL SECTION - TRADE EXPO INDONESIA 2023

Kadin Indonesia dan Kementerian Perdagangan Dorong Ekspor Indonesia di TEI 2023

Di tengah tren moderasi harga komoditas dan perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar USD3,42 miliar pada bulan September 2023, atau merupakan surplus selama 41 bulan berturut-turut. Secara kumulatif Januari–September 2023, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD 27,75 miliar. Hal ini menunjukkan kinerja sektor eksternal Indonesia yang masih kuat dan akan terus kita terus dorong ke depannya.

Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan produk ekspor dan memperluas pasar ekspor tanah air, Kadin Indonesia bersama dengan Kementerian Perdagangan mengadakan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 yang diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pada 18 Oktober 2023.

Presiden RI, Joko Widodo, secara resmi membuka TEI 2023 secara virtual. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan harapannya agar TEI 2023 menjadi ajang yang dapat memperluas dan meningkatkan pasar, sehingga pengusaha Indonesia, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia, dan industri produk lokal Indonesia bisa semakin maju dan menjadi bagian penting dari rantai pasok global.

“Era globalisasi dan kompetisi yang semakin ketat kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh hanya menjadi pasar, kita harus menjadi pelaku, harus menjadi produsen yang berdaya saing dan menguasai pasar,” kata Jokowi.

(lanjutan di halaman 48)



Acara pameran internasional ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga.

TEI 2023 digelar secara *hybrid* dengan mengusung tema "Sustainable Trade For Global Economic Resilience". Pameran yang menghadirkan beragam produk unggulan Indonesia ini akan diselenggarakan selama lima hari, yakni 18-22 Oktober 2022 di ICE, BSD City, sementara pameran online akan berlangsung pada 18 Oktober-18 Desember 2023 melalui www.tradexpoindonesia.com.



Kadin Indonesia Berperan Aktif dalam Mendorong Pertumbuhan Produk Ekspor Indonesia

TEI merupakan ajang tahunan yang menghadirkan produk-produk lokal terbaik Indonesia, *business matching*, *business counseling*, dan seminar guna mengembangkan jaringan bisnis, serta menarik investasi untuk mendorong ekspor Indonesia.

Sebagai bentuk dukungan akan gelaran ini, Kadin Indonesia turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan. Bersama dengan gelaran expo ini, Kadin Indonesia melangsungkan *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Peningkatan Kinerja Ekspor Indonesia 2024 yang diharapkan dapat meningkatkan pangsa ekspor di tahun 2024 serta meningkatkan pertumbuhan sebesar 30 persen di sembilan sektor prioritas, yaitu mineral, Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, tekstil, makanan dan minuman, otomotif, furniture, farmasi, emas dan perhiasan, serta kopi, teh, dan rempah-rempah.

(lanjutan di halaman 49)

Selain itu, WKU Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, memberikan kata sambutan dalam side event TEI, yakni Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) pada 19 Oktober 2023. Juan menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan dorongan dan perhatian khusus terhadap komoditas fesyen muslim melalui Pembentukan Komite Pengarah dan Komite Penyelenggara Promosi Fesyen Muslim Indonesia. Berhubungan dengan hal tersebut, Kadin Indonesia sebagai perwakilan dari kalangan pengusaha memberikan dukungan penuh kepada inisiatif yang baik ini.



“Melihat dari peluang dan perkembangan pasar dunia modest fesyen, industri ini dapat menjadi motor penggerak ekspor Indonesia. Daya beli konsumen *modest fashion* diproyeksikan meningkat 6,1 persen dalam lima tahun dan diperkirakan mencapai USD 375 miliar pada 2025,” kata Juan.

Dukungan pemerintah tidak hanya terhadap komoditas fesyen muslim, tetapi juga perdagangan luar negeri. Seperti contohnya melalui Atase Perdagangan yang memainkan peran penting dalam menghubungkan bisnis Indonesia dengan pasar internasional. Namun, kesuksesan perkembangan ekspor di Indonesia tidak terlepas dari peran pengusaha-pengusaha muda Indonesia yang semakin melek akan bisnis dan teknologi dalam mendongkrak nilai dan jumlah ekspor Indonesia, khususnya dengan memanfaatkan digitalisasi. Dengan adopsi teknologi yang tepat, UMKM dan bisnis Indonesia dapat meningkatkan daya saing, efisiensi, pemasaran produk, serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan transaksi di pasar global, khususnya dengan teknologi tanda tangan digital dan identitas digital.



Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran identitas digital dan tanda tangan digital yang tersertifikasi dalam bisnis modern, Privy, sebagai Official Digital Signature and Tax Reporting Partner acara TEI, menggelar Seminar “Accelerating Export Growth: The Power of Digital Transformation & Technology” pada 18 Oktober 2023. Di dalam seminar tersebut, Wakil Direktur Eksekutif I Sekretariat Kadin Indonesia, Mercy Simorangkir, menjadi moderator yang memandu sesi tanya jawab dengan beberapa narasumber termasuk CEO PT Privy Identitas Digital Marshall Pribadi, Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra Agung Haris Setiawan, Chairman HIPMI Womenpreneur Melissa A. Hamid, serta CEO PT. Wifkain Teknologi Indonesia Sara Sofyan.

(lanjutan di halaman 50)

Di dalam rangkaian acara TEI ini, Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia pun turut aktif terlibat dalam rangkaian seminar sebagai narasumber seminar kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 dengan topik "Keterlibatan Aktif Pelaku Usaha dalam Implementasi MoU on Skills Development Exchange Pilot" pada 19 Oktober 2023. Seminar tersebut dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Provinsi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Indonesia Australia Business Council (IABC), Indonesia Service Dialogue (ISD) Council, serta 60 peserta online via Zoom.



Tujuan dari diadakannya seminar ini adalah untuk menyebarkan informasi mengenai Memorandum of Understanding (MoU) yang merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas pasar kerja tenaga terampil Indonesia, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, dan meningkatkan pemanfaatan MoU.

Selain itu, pada gelaran TEI 2023, Kadin Indonesia turut berpartisipasi melalui kehadiran *booth* untuk secara langsung memberikan informasi dan melayani pendaftaran anggota Kadin.

Seluruh rangkaian acara TEI pun ditutup pada 22 Oktober 2022 oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Zulkifli mengatakan, "Alhamdulillah, di tengah melambatnya ekonomi dunia, karena kerja sama dan dukungan semua pihak, volume transaksi sementara TEI 2023 mencapai dua kali lipat dari transaksi tahun sebelumnya, yaitu tercatat sebesar USD 25,3 miliar atau Rp401,5 triliun," ujar Zulkifli.

Kadin Indonesia berharap pencapaian yang baik ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk terus mengembangkan upaya promosi perdagangan, serta meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global.

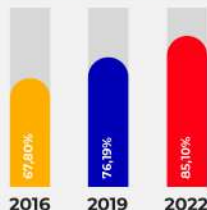


Kadin Indonesia Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

Tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan, menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. Data SNLIK 2022 mengungkapkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 49,68 persen, yang merupakan lonjakan signifikan dari tahun 2019 yang hanya mencapai 38,03 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan pada tahun yang sama mencapai 85,10 persen, mengalami peningkatan yang cukup mencolok dibandingkan dengan periode SNLIK sebelumnya pada tahun 2019 yang hanya mencapai 76,19 persen. Hasil ini menunjukkan perkembangan dalam pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Satu hal yang menonjol dari hasil SNLIK 2022 adalah menurunnya kesenjangan antara tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan. Gap ini telah berkurang dari 38,16 persen pada tahun 2019 menjadi 35,42 persen pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan dan akses terhadap layanan keuangan yang lebih luas.

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.



INDEKS INKLUSI KEUANGAN

TINGKAT INKLUSI KEUANGAN BERDASARKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Sebagai bukti konkret komitmen Kadin Indonesia untuk mendorong pemahaman dan inklusi keuangan di Indonesia, Kadin Indonesia merayakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang jatuh pada bulan Oktober. Dalam rangkaian peringatan BIK ini, Kadin Indonesia memberikan dukungan penuh pada acara bertema "Menuju Indonesia Maju melalui Literasi dan Inklusi Keuangan" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pusat dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Apindo di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Acara ini diadakan atas kerja sama dengan IDX kantor cabang Kalimantan Timur dan mendapat dukungan yang kuat dari pihak-pihak terkait. Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan (BKMJK) Kadin Indonesia, Tigor M. Siahaan dan Penanggung Jawab Pengembangan Pasar Modal BKMJK, Gunawan Tjokro, turut hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan pentingnya literasi keuangan serta inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan adalah langkah kunci dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat dan inklusif. Kadin Indonesia berharap bahwa dengan upaya bersama, kita dapat terus mendorong pemahaman dan akses terhadap layanan keuangan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Literasi Keuangan adalah pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), keyakinan (confidence) yang mempengaruhi sikap (attitude), dan perilaku keuangan (behaviour) seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.



INDEKS LITERASI KEUANGAN

TINGKAT LITERASI KEUANGAN BERDASARKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

SPECIAL SECTION - BULAN INKLUSI KEUANGAN

Kadin Indonesia Dorong Pertumbuhan Bisnis Jawa Barat melalui Forum Bisnis

Pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan adalah tujuan yang dikejar oleh banyak perusahaan, termasuk di wilayah Jawa Barat yang merupakan salah satu urat nadi ekonomi Indonesia. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai perekonomian Jawa Barat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada 2022 mencapai Rp1.589 ribu triliun atau hampir Rp1,6 kuadriliun.

Namun, pertumbuhan yang berkelanjutan seringkali memerlukan sumber daya finansial yang cukup besar, yang dapat menjadi tantangan bagi banyak perusahaan, terutama yang beroperasi di skala kecil dan menengah. Untuk itu, pemahaman tentang alternatif pendanaan menjadi semakin relevan.



Salah satu alternatif pendanaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan adalah melalui pasar modal. Pasar modal, terutama dengan melibatkan langkah seperti *Initial Public Offering* (IPO) dan kapitalisasi pasar, memberikan peluang bagi perusahaan untuk menghimpun dana dari investor yang bersedia untuk berbagi risiko dan keuntungan.

Peran Pendampingan Kadin Indonesia

Namun, untuk banyak perusahaan, langkah-langkah seperti IPO dan kapitalisasi pasar masih memerlukan bimbingan dan pendampingan. Di situlah Kadin Indonesia memainkan peranan penting. Kadin Indonesia, melalui berbagai program dan inisiatif, berkomitmen untuk membantu perusahaan dalam memahami, merencanakan, dan mengimplementasikan langkah-langkah ini.

(lanjutan di halaman 53)

Kepala Badan Kajian dan Pengembangan Pasar Modal Keuangan (BKMJK) Kadin Indonesia, Tigor M. Siahaan, berkolaborasi dengan Kadin Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan acara Forum Bisnis yang membahas "Pasar Modal Sebagai Alternatif Pendanaan dalam Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan." Acara ini berlangsung di Hotel Aryaduta, Bandung pada 20 Oktober 2023.

Forum Bisnis ini merupakan bagian dari implementasi kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani pada tahun 2022 antara Ketua Umum Kadin Indonesia, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan merupakan kelanjutan dari acara Forum Diskusi "Road to Go Public" yang digelar di Menara Kadin Indonesia pada 3 Oktober sebelumnya.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, termasuk Kepala BKMJK Kadin Indonesia Tigor M. Siahaan, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat Cucu Sutara, serta perwakilan dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Para pelaku usaha dari berbagai sektor juga turut hadir, menunjukkan antusiasme mereka dalam mengembangkan bisnis mereka melalui penawaran saham di Bursa Efek.

Lebih dari 100 peserta, terdiri dari anggota Kadin Jawa Barat dan pelaku usaha lokal, hadir dalam acara ini. Mereka menyambut baik kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang pasar modal dan bagaimana memanfaatkannya sebagai sumber pendanaan untuk pertumbuhan bisnis mereka.



Forum Bisnis ini merupakan langkah awal dalam peningkatan literasi pasar modal, yang akan diikuti dengan kegiatan *coaching clinic* yang akan diselenggarakan oleh Bursa Efek Jawa Barat. Coaching clinic ini akan memberikan panduan dan dukungan kepada perusahaan di Jawa Barat yang ingin melangkah lebih jauh dengan melakukan IPO dan kapitalisasi pasar.

Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan, terutama melalui pemahaman yang lebih baik tentang pasar modal sebagai alternatif pendanaan yang potensial. Kadin Indonesia berharap bahwa upaya ini akan membawa manfaat bagi perkembangan ekonomi Jawa Barat dan mendorong perusahaan di wilayah tersebut untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.

Bulan Inklusi Keuangan, Kadin Indonesia Fokus Perkuat Edukasi Masyarakat

Bulan Oktober secara resmi ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan lembaga atau kementerian jasa keuangan sebagai Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Melalui peraturan yang diterbitkan oleh OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, istilah inklusi keuangan mengacu pada ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan akses ini perlu didukung oleh peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, literasi masyarakat akan keuangan digital dan inklusi keuangan memainkan peran yang penting.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan digital Indonesia mencapai 41 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 59 persen masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai produk dan layanan keuangan digital. Di sisi lain, World Bank meyakini inklusi keuangan merupakan faktor pendorong utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran kolektif.

Pada momen Bulan Inklusi Keuangan ini, Kadin News berkesempatan untuk mewawancarai beberapa Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, antara lain, WKU Bidang Kominfo Firlie H. Ganinduto, Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Keuangan Digital Pandu Sjahrir, dan WKU Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, untuk berbagi pandangan terhadap bulan inklusi keuangan dan pentingnya literasi digital bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, kerap ditemui berbagai tantangan untuk dipecahkan bersama dalam upaya mewujudkan keuangan yang inklusif. WKU Bidang Kominfo, Firlie H. Ganinduto, mengatakan rendahnya literasi masyarakat dan konektivitas masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keuangan yang inklusif. Firlie menerangkan, secara spesifik, literasi masyarakat Indonesia terhadap keuangan dan keuangan digital masih minim, dimana mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait produk dan layanan keuangan yang dapat mereka akses, berikut manfaatnya. Terkait konektivitas, cakupan akses internet di Indonesia memang terbilang semakin luas, hanya saja koneksi internet masih perlu dibenahi untuk memastikan *connectivity rate* di Indonesia mencapai level yang baik demi menunjang keuangan yang inklusif di Indonesia.

Tidak hanya itu, Firlie juga menambahkan, keamanan siber (*cyber security*), terutama pada sektor keuangan digital juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keuangan yang inklusif, mengingat meningkatnya kasus *cyber attack* akhir-akhir ini.

Senada dengan Firlie, Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Keuangan Digital, Pandu Sjahrir, juga menyebutkan bahwa ketersediaan akses dan keamanan (*security*) merupakan aspek yang perlu untuk meningkatkan inklusi keuangan di tanah air. Dengan terbangunnya keamanan akan sejalan dengan keterlibatan masyarakat yang lebih terhadap produk-produk keuangan. Pandu juga menekankan pada pentingnya penyediaan infrastruktur digital. Penyediaan jaringan 5G adalah salah satu contoh infrastruktur digital yang perlu diupayakan kualitas dan pemerataannya.

Untuk mewujudkan keuangan yang inklusif di Indonesia dan peningkatan literasi digital sebagai aspek penunjang untuk mengakselerasi terciptanya inklusivitas keuangan di Indonesia, Kadin Indonesia melalui berbagai bidang telah menerapkan strategi dan aksi nyata. Bergerak di sisi regulasi, Badan Pengembangan Ekosistem Keuangan Digital telah melakukan usulan pengembangan kebijakan yang memudahkan transisi dari pembayaran tunai menjadi pembayaran non tunai (*cashless*) dan komunikasi berkelanjutan dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dapat menentukan best practice infrastruktur digital yang telah diterapkan di negara maju. Selain itu, memperluas penggunaan sistem QR Code, investasi pada perusahaan teknologi finansial, dan upaya memudahkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur digital juga menjadi bagian dari strategi yang telah dilakukan.



Mengingat pentingnya literasi keuangan digital dalam konteks mewujudkan keuangan yang inklusif, Firlie menjelaskan, Bidang Kominfo terus melakukan koordinasi dengan Kadin di tingkat daerah untuk memastikan pesan kunci mengenai keuangan digital tersampaikan dengan baik demi meningkatkan literasi masyarakat. Bidang Kominfo juga telah terlibat dalam program internet murah untuk masuk ke desa dan remote area yang ada di Indonesia. Inklusi keuangan juga merupakan faktor yang dapat mendukung aktivitas pelaku bisnis, tidak terkecuali UMKM. Manifestasi keuangan yang inklusif bagi para pelaku bisnis ini dapat nampak dari kemudahan akses pendanaan, hingga penyediaan akses digital yang dapat menunjang aktivitas jual-beli. Sependapat dengan Firlie dan Pandu tentang pentingnya akses dan literasi digital, WKU Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, turut memberikan pandangannya bahwa eksistensi *e-commerce* saat ini sejatinya dapat menjadi partner bagi UMKM untuk memperluas pasar.

Meskipun Indonesia kian mengalami lompatan yang jauh dalam perkembangan inklusi keuangan, merupakan sebuah cita-cita bersama bahwa masyarakat dapat semakin memiliki akses terhadap layanan keuangan diiringi dengan kondisi inklusi keuangan yang semakin berkualitas. Ketiga WKU Kadin Indonesia memiliki harapan yang sama akan terwujudnya cita-cita ini melalui kolaborasi multipihak lewat penyediaan infrastruktur digital dan peningkatan literasi masyarakat.



Kadin Indonesia Serahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 kepada Ketua MPR RI

Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia turut mendukung Visi Indonesia Emas 2045 yang diluncurkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, yang berisi gambaran ideal yang harus dicapai Indonesia di usianya yang ke-100 tahun sejak kemerdekaannya.

Sebagai wujud konkret dari komitmen tersebut, Kadin Indonesia telah menyusun Peta Jalan Indonesia Emas 2045 secara inklusif dan kolaboratif sebagai persembahan dari Kadin untuk Indonesia.

Setelah secara resmi diserahkan kepada Presiden RI, Joko Widodo, pada Agustus yang lalu, kali ini Kadin Indonesia berkesempatan menyerahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 kepada Ketua MPR RI pada 30 Oktober 2023. Penyerahan dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR-RI), Bambang Soesatyo di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta.



Penyerahan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ini merupakan upaya Kadin Indonesia untuk ikut memberikan rekomendasi dan panduan dalam pembuatan kebijakan pada pembangunan nasional yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, tangguh, inklusif dan berkelanjutan.

WKU Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Carmelita Hartoto, WKU Bidang Vokasi dan Sertifikasi Adi Mahfudz, WKU Bidang Industri Olahraga Irawadi D. Hanafi, dan WKU Bidang Organisasi Eka Sastra juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.



Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan inti dari visi ini terletak pada filosofi 'Gotong Royong' dan 'Bhinneka Tunggal Ika' yang menekankan semangat bekerja sama untuk manfaat yang lebih besar dan merayakan persatuan dalam perbedaan.

SPECIAL SECTION - KADIN IMPACT AWARD 2023

Kadin Indonesia Dorong Perekonomian Masyarakat melalui Program Kadin Muara Enim Desaku dengan Berdayakan 246 Desa



Kadin Indonesia terus mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah melalui ajang Kadin Impact Award (KIA). Melanjutkan rangkaian penjurian KIA, Kadin Indonesia mengunjungi Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, pada 13 Oktober 2023 untuk melihat program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari desa ke desa yang diinisiasi Kadin Muara Enim. Melalui program “Kadin Muara Enim Desaku” ini, proses penggalian potensi, pendampingan, dan pemberdayaan UMKM di desa-desa di wilayah Kabupaten Muara Enim dilakukan secara intensif untuk mendorong terciptanya produk unggulan di tiap desa. Penjurian dilakukan oleh WKU Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjourang dan Ketua Komite Tetap Produk Hukum dan Perizinan Daerah, Johan Tedja Surya.

Melalui program “Kadin Muara Enim Desaku”, tercatat 88 produk unggulan yang tengah memasuki pasar modern setelah mendapatkan pelatihan *digital marketing*, pendampingan akses permodalan, *packaging*, dan pemasaran. Selain itu, melalui pendampingan yang dilakukan, terdapat 649 UMKM binaan yang mendapat bantuan untuk memiliki legalitas usaha NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Program ini juga telah menumbuhkan wirausahawan muda di Muara Enim dengan tercatat adanya 500 NIB baru. Hingga akhir 2022, program “Kadin Muara Enim Desaku” telah melakukan pembinaan di 246 desa dan menciptakan 1.983 UMKM binaan.



SPECIAL SECTION - KADIN IMPACT AWARD 2023

Dukung Peningkatan Mutu UMKM Agar Naik Kelas, Kadin Kota Kediri Hadirkan Program “Rumah Kurasi”



Penjurian dilanjutkan pada 17 Oktober 2023, dimana tim juri KIA berkesempatan mengunjungi dan melakukan penjurian “Rumah Kurasi” yang diinisiasi oleh Kadin Kota Kediri untuk membantu UMKM dalam meningkatkan mutu produknya agar bisa naik kelas. Hadir juga dalam kunjungan ini, Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Feri Rizal, Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto, dan Komite Tetap Wilayah Sumatera Kadin Indonesia, Dripa Sjabana.

Rumah Kurasi merupakan salah satu lembaga kurasi di Indonesia yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap mutu produk UMKM baik berupa produk fisik atau jasa. Nantinya, produk yang telah dikurasi akan melalui proses klasterisasi agar UMKM tersebut bisa mengikuti program scale-up dan pendampingan yang sesuai kebutuhan mereka.

(lanjutan di halaman 59)



Ide Rumah Kurasi berawal saat pandemi Covid-19 melanda. Banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) menggugah Kadin Kota Kediri untuk mendorong perbaikan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Kerja sama antara Kadin Kota Kediri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Kediri, dan Pemerintah Kota Kediri ini diharapkan mampu mewadahi dan menjamin mutu hasil kurasi produk UMKM, sehingga bisa menciptakan produk berkualitas global.

Pelaku usaha UMKM bisa menikmati beberapa layanan di rumah kurasi, diantaranya yakni kurasi produk, onboarding UMKM, pendampingan dan pengembangan UMKM, aggregator ekspor produk, dan korporatisasi UMKM. Hingga Januari 2023, sedikitnya ada 1.500 produk unggulan yang terdaftar di Rumah Kurasi dan 888 produk unggulan yang tersertifikasi. Produk yang sudah melalui proses kurasi banyak dipasarkan di berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, hingga Maluku. Beberapa produk hasil kurasi juga sudah diekspor hingga ke negara ASEAN seperti Malaysia dan bahkan hingga Amerika Serikat.





SPECIAL SECTION - KADIN IMPACT AWARD 2023

Kadin NTT Dukung Net Zero Emission Melalui Pengembangan Energi Hijau



Melanjutkan rangkaian penjurian KIA, tim penjurian melakukan roadshow ke Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 25 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut, Kadin NTT memperkenalkan program inisiatif berdampak sosial-ekonomi dan lingkungan yang berkomitmen mendukung inovasi terbaru dalam sektor energi hijau melalui *Green Energy Co-Firing Wood Chips*. Tim penilai kali ini diwakili oleh WKU Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Silverius Oscar Unggul, WKU Wilayah Teuku Zulham, dan Ketua Komite Tetap Wilayah Hervian Tahier.



Inisiatif Kadin NTT dalam mendukung pemerintah melakukan transisi energi menuju Net Zero Emission telah melahirkan program *co-firing* yang digabungkan dengan teknologi *wood chips*. Inovasi ini berawal dari kerja sama penelitian antara Universitas Nusa Cendana, PT Timor Bio Energy (TBE), dan Kadin NTT yang berupaya menemukan substitusi batu bara sebagai sumber energi listrik di Provinsi NTT.

Hasil kolaborasi penelitian para pemangku kebijakan tersebut menemukan jenis kayu standar kalor (GAR) yang memiliki kandungan sama dengan batu bara. Temuan penelitian tersebut mendorong transisi penggunaan batu bara dengan GAR untuk dilakukan. Saat ini, penggunaan substitusi batu bara sebagai pasokan energi terbarukan di PLTU Bolok-Kupang telah mencapai 5% atau 30 ton/hari.



Melihat potensi yang luar biasa, Kadin NTT juga menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) NTT, dimana terdapat 17 kelompok kerja binaan Bumdes yang berprofesi sebagai pemasok kayu. Hingga 2023, produksi GAR memiliki lima pabrik di tiga Kabupaten/Kota di NTT. Kerja sama ini juga membuka potensi lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar NTT. Hingga hari ini, setidaknya terdapat hampir 600 pembukaan lapangan kerja baru untuk masyarakat lokal.

SPECIAL SECTION - KADIN IMPACT AWARD 2023

"Kadin Pertanian Hub" Sukses Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Manggarai Barat NTT

Keesokan harinya pada 26 Oktober 2023, tim penjurian KIA melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk melihat program berdampak sosial dan ekonomi Kadin Manggarai Barat inisiatif Kadin NTT dalam memaksimalkan potensi pertanian dan pariwisata nasional melalui program "Kadin Pertanian Hub". Penjurian diwakili oleh WKU Wilayah Teuku Zulham dan Ketua Komite Tetap Wilayah Hervian Tahier.

Bekerja sama dengan Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Manggarai Barat, program "Kadin Pertanian Hub" berfokus pada peningkatan kapasitas petani binaan, khususnya dalam pemberdayaan produk lokal seperti padi dan jagung. Tak hanya itu, program ini juga digagas untuk membantu petani dalam penyaluran atau pemasaran produk lokal, sehingga mampu meningkatkan produktivitas petani, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi jumlah pengangguran.

Dari evaluasi yang telah dijalankan, program "Kadin Pertanian Hub" telah memberikan dampak positif, tidak hanya pada sektor ekonomi tetapi juga pada aspek sosial dan budaya. Petani kini diberdayakan dengan pengetahuan baru untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian hingga mampu bersaing dengan produk luar daerah. Stabilisasi harga beras memastikan pendapatan yang lebih baik bagi petani dan memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menumbuhkan rasa percaya pada hasil kerja kualitas petani lokal dan mendorong konsumsi produk lokal.

Sebagai implementasi program, Kadin Indonesia bekerja sama erat dengan mitranya dalam menyediakan sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, serta pestisida dan sekaligus sebagai *offtaker*. Sementara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berperan sebagai pendamping untuk meningkatkan *skill* dan kapasitas para petani.



MANFAAT

Keanggotaan **Kadin**

Nikmati ragam keuntungan dan manfaat dengan menjadi bagian dari **keanggotaan Kadin Indonesia**



Update terhadap
Perkembangan Ekonomi
dan **Bisnis**



Net Zero



Dukungan **Advokasi**



Kemudahan **Pembuatan**
Surat Keterangan



Scaling up skill/
Kemampuan Wirausaha
dan Pekerja



Akses terhadap **Market**



Tumbuhkan Bisnis melalui
Network dan **Kolaborasi**



Akses terhadap
Transformasi Digital



Kesempatan **Promosi**



Dukungan dalam
Penerapan TKDN



Terlibat dalam
Penyusunan Kebijakan
Industrial



Potongan Harga

CARA PENDAFTARAN

Anggota Kadin



Scan QR Code atau
kunjungi **anggota.kadin.id**

1



Klik **"Daftar Anggota"**, lalu pilih jenis keanggotaan

2



Membuat akun dengan mendaftarkan **email** dan **NIK**

3



Menerima notifikasi pendaftaran akun dari **info.anggota@kadin.id**

4



Masuk dengan akun yang didaftarkan

5



Lengkapi formulir dengan data yang diperlukan

Persyaratan yang dibutuhkan:

- ✓ Email Penanggung Jawab
- ✓ NIB Perusahaan
- ✓ AKTA Perusahaan
- ✓ NPWP Perusahaan
- ✓ KTP Direksi
- ✓ Foto Pass Direksi
- ✓ No HP Penanggung Jawab

6



Menerima notifikasi dan unduh invoice pembayaran

7



Melakukan pembayaran ke rekening/ virtual account yang tertera di invoice

8



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**

9



Download **KTA-B**, Anda telah resmi menjadi anggota Kadin

CARA MEMPERPANJANG KEANGGOTAAN KADIN

Hotline Keanggotaan
0813 8862 8081 | 0813 9830 2790



Kunjungi **anggota.kadin.id**



Masukan Email dan kata sandi, lalu klik **"Masuk"**



Klik menu **"KTA"**, lalu klik menu **"Perpanjang KTA"**



Menerima notifikasi perpanjangan keanggotaan dan invoice dari **info.anggota@kadin.id**



Melakukan pembayaran ke rekening/virtual account yang tertera di invoice



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



Download **KTA-B**, Anda telah memperpanjang keanggotaan Kadin

FITUR TERBARU

Website **Kadin.id**



Forum Anggota Kadin

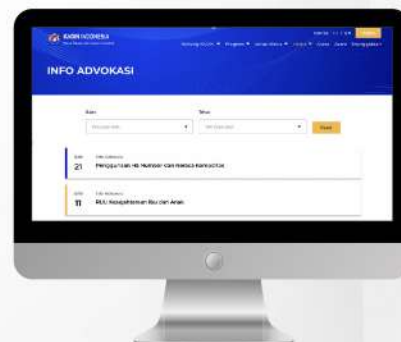
Dibuat sebagai tempat **berbagi informasi** seputar bisnis, *networking*, dan diskusi interaktif seputar perkembangan dunia usaha. Forum Anggota Kadin dikelola oleh Sekretariat Kadin Indonesia sebagai administrator.

Layanan Kadin



Halaman-halaman yang menonjolkan **layanan sekretariat** dan **manfaat keanggotaan**

Info Advokasi Kadin



Tempat untuk menghimpun informasi mengenai **perkembangan advokasi terkini** yang dilakukan oleh Kadin

KABAR TERKINI

Aturan Baru Pemerintah untuk Permudah Ekspor UMKM

SUMBER: KONTRAKHUKUM.COM

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masuk pasar ekspor.

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC, Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Barang Kirimin. Adapun regulasi ini telah diterbitkan pada 12 Oktober 2023 lalu.

Donny menjelaskan, PMK 96/2023 ini tidak hanya mengatur ketentuan impor barang untuk bisa masuk pasar e-commerce, tetapi juga mendorong ekspor kelompok UMKM.

"Kami mengatur kegiatan ekspor karena semakin meningkatnya perdagangan lintas negara melalui e-commerce, sehingga kami perlu memfasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi kami mendorong ekspor, khususnya dari teman-teman UMKM," kata Donny, Kamis (12/10/2023).

Dengan adanya PMK 96/2023, Donny menjelaskan, pemerintah ingin menetapkan aturan yang sama terkait impor maupun ekspor barang kiriman.

Ketentuan Ekspor UMKM dalam Aturan Baru

Seperti tertera dalam Pasal 43 ayat (1) PMK 96/2023, dimana ekspor barang kiriman dengan berat kotor kurang dari 30 kg dan diekspor oleh eksportir yang bukan badan usaha akan dilaporkan melalui penyampaian consignment note (CN) oleh penyelenggara pos pada pejabat bea dan cukai di kantor pabean.

Hal serupa juga berlaku untuk barang impor yang diberitahukan dengan CN yang akan diekspor kembali.

"Ini kami lakukan untuk memberikan kesempatan kepada UMKM yang ingin melakukan kegiatan pameran di luar negeri. Kalau barang yang dikembalikan jumlahnya kecil, kurang dari 30 kilogram, kita harap saat dikembalikan mereka mudah mengurus pembebasan bea masuk, sepanjang barang itu bisa dibuktikan nyata dari Indonesia," pungkas Donny.

CN yang dimaksud setidaknya mengandung elemen data nomor dan tanggal identitas barang kiriman, nama sarana pengangkut, nomor voyage/flight. Negara tujuan, daerah asal barang kiriman, berat kotor, biaya pengangkutan, dan asuransi jika ada.

Selain itu, juga harga barang dalam cara penyerahan (incoterm) Free on Board (FOB), cara penyerahan barang, mata uang, bea keluar yang harus dibayarkan jika ada, uraian jumlah dan jenis barang, pos tarif atau HS code, serta nomor dan tanggal invoice jika barang kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan.

Selanjutnya, jenis, nomor, dan tanggal dokumen perizinan; nama dan alamat pengirim barang; nomor telepon pengirim barang jika ada, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengirim barang; nama dan alamat penerima/pembeli; nama dan nomor identitas Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk transaksi di PPMSE; serta kantor pabean pemuatan ekspor barang kiriman.

Sementara untuk ekspor barang kiriman di atas 30 kg dan diekspor oleh eksportir yang merupakan perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat, maka eksportir atau penyelenggara pos menyampaikan pemberitahuan ekspor barang.

Hal yang sama juga berlaku untuk barang kiriman ekspor oleh eksportir yang merupakan perusahaan penerima fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian serta barang impor yang diberitahukan dengan PIB/PIBK yang akan diekspor kembali.

Upaya Lainnya untuk Permudah Ekspor UMKM

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan, pemerintah menargetkan kontribusi UMKM nasional di kisaran 17 persen pada 2024.

Terkait dengan hal ini, pemerintah pun terus memberikan kemudahan untuk mendukung upaya peningkatan ekspor produk UMKM, salah satunya dengan pembentukan ekosistem ekspor.

Di dalam ekosistem ini, pelaku UMKM dapat bertemu dengan agregator yang didukung lembaga pembiayaan ekspor.

Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan kapasitas dan kemampuan ekspor UMKM disertai dengan pendampingan dan fasilitasi standarisasi. Upaya lainnya meliputi fasilitas buyer mapping (pemetaan pembeli) dan market intelligence (kemampuan menganalisa pasar) untuk produk berbahan alami ke pasar Eropa.

Kemudian pemerintah juga terus melakukan perluasan pasar melalui platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Amazon, serta adanya katalog promosi digital UMKM potensial ekspor melalui website <https://smesta.kemenkopukm.go.id>.

Tidak hanya itu, dalam rangka mendorong peningkatan ekspor, diperlukan pula penguatan usaha dalam negeri dan ketersediaan produk lokal, salah satunya dengan melibatkan UMKM yang perlu didukung pemerintah lewat kemudahan perizinan usaha.

Pasalnya, birokrasi perizinan usaha yang panjang dan rumit menjadi salah satu kendala yang banyak dirasakan pelaku UMKM sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja.

Kini, melalui sistem digital yaitu Online Single Submission (OSS), pelaku UMKM dapat memperoleh izin usahanya dengan lebih cepat dan mudah, termasuk pemenuhan dokumen legalitas untuk ekspor produk.

Memangnya Apa Saja Dokumen Legalitas untuk Ekspor UMKM?

Perlu diketahui bahwa pelaku UMKM yang ingin melakukan ekspor diwajibkan mempunyai badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 77/M-DAG/PER/12/2013.



Setelah berbentuk PT, selanjutnya pelaku UMKM dapat melengkapi dokumen legalitas ekspor, diantaranya:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
- Invoice
- Packing list
- Bill of lading yang diterbitkan shipping company (jalur laut) dan airway bill (udara)



Selain dokumen ekspor dan legalitas, terdapat beberapa surat yang juga dibutuhkan sebelum melakukan ekspor produk, antara lain:

- Shipping instruction eksportir kepada shipping line
- Certificate of origin dari Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten/Kota
- Certificate of analysis dari laboratorium
- Certificate of phytosanitary dari badan karantina untuk produk tumbuhan
- Dokumen tambahan sesuai permintaan pembeli

KABAR TERKINI

Merintis Jalan Baru: Strategi Nasional Indonesia untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia

SUMBER: HUKUMONLINE.COM

Untuk mewujudkan komitmen Indonesia terhadap pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia di tingkat nasional, serta pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, pemerintah telah menyadari pentingnya merumuskan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ("Stranas BHAM"), yang kini telah ditetapkan secara resmi melalui diundangkannya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 (Perpres 60/2023).

Pada intinya, pembentukan Stranas BHAM ditujukan untuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam praktik bisnis secara lebih efektif dan komprehensif. Dalam Indonesian Legal Brief edisi kali ini, analisis kami terhadap Stranas BHAM Indonesia yang baru didasarkan pada kerangka Perpres 60/2023 dan menyoroti hal-hal berikut:

Dasar Stranas BHAM;
Poin-Poin Penting Stranas BHAM; dan
Pelaksanaan Stranas BHAM.

Dasar Stranas BHAM

Pada intinya, Stranas BHAM mengadopsi pilar-pilar utama Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, seperti yang dirangkum di bawah ini:

Pilar 1:

Tanggung Jawab Negara untuk
Melindungi Hak Asasi Manusia

Negara harus mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk pelaku usaha yang beroperasi di wilayah dan/atau yurisdiksinya, dengan mengambil tindakan yang akurat untuk mencegah, menyelidiki dan mengadili setiap pelanggaran hak asasi manusia, serta memulihkan hak asasi manusia melalui penerbitan kebijakan, peraturan perundang-undangan, peraturan dan sistem jaminan yang efektif baik melalui cara yuridis maupun non yuridis.

Negara harus menyatakan ekspektasinya secara jelas bahwa pelaku usaha yang beroperasi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksinya harus menghormati hak asasi manusia setiap kali mereka melakukan kegiatan usahanya.

Pilar 2:

Tanggung Jawab Pelaku Usaha untuk
Menghormati Hak Asasi Manusia

Pelaku usaha harus memiliki kebijakan dan proses yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk: (1) Implementasi kebijakan hak asasi manusia; (2) Pelaksanaan uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan setiap risiko yang mungkin timbul dari pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan usahanya; dan (3) Melakukan upaya untuk mengatasi setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kegiatan usahanya.

Pelaku usaha harus menghormati hak asasi manusia dan harus berupaya mencegah, meminimalkan, dan memitigasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama kegiatan usahanya, termasuk dalam kemitraan yang dilakukannya.

(lanjutan di halaman 69)

Dalam merumuskan Stranas BHAM, pemerintah telah menerapkan empat metode berbeda, yang dirangkum di bawah ini

Pengkajian Berbasis Bukti

Stranas BHAM dibentuk berdasarkan baseline riset pada sektor pertanian, pertambangan dan pariwisata guna memetakan secara komprehensif berbagai tantangan, strategi, output dan sektor prioritas yang dapat diterapkan.

Sinergi Lintas Strategi

Stranas BHAM disinergikan dengan strategi negara lainnya, seperti Strategi Pembangunan Berkelanjutan, Strategi Pencegahan Korupsi, Strategi Hak Asasi Manusia dan strategi relevan lainnya yang telah diadopsi.

Partisipasi Pemangku Kepentingan

Stranas BHAM dirumuskan melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok rentan, termasuk konsultasi dengan pelaku usaha yang semuanya berperan dalam memberikan masukan terhadap Stranas BHAM.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB

Stranas BHAM menganut prinsip-prinsip inti sebagai berikut: (1) Kewajiban negara untuk melindungi; (2) Pertanggungjawaban pelaku usaha untuk menghormati; dan (3) Pemulihan efektif bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, baik langsung maupun tidak langsung.

Poin-Poin Penting Stranas BHAM

Pada intinya, Stranas BHAM mencakup aspek-aspek berikut: 1) Kewajiban negara untuk melindungi; 2) Pertanggungjawaban pelaku usaha untuk menghormati; dan 3) Pemulihan efektif bagi korban pelanggaran hak asasi manusia baik langsung maupun tidak langsung.

Sebelum menentukan poin-poin penting Stranas BHAM, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa tantangan yang ada serta beberapa area fokus yang diharapkan dapat diperkuat melalui Stranas BHAM. Berikut adalah rangkuman area fokus prioritas yang akan diperkuat melalui penerbitan Stranas BHAM:

Peningkatan pemahaman terhadap permasalahan dan norma terkait bisnis dan hak asasi manusia bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum

Evaluasi, harmonisasi dan penajaman regulasi yang berkaitan dengan isu bisnis dan hak asasi manusia

Pemberian pedoman bagi pelaku usaha yang memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan kegiatan usahanya

Perluasan akses terhadap informasi melalui mekanisme pelaporan kasus bisnis dan hak asasi manusia yang ada

Evaluasi dan peningkatan efektivitas akses terhadap pemulihan melalui jalur yuridis dan/atau non-yudisial untuk kasus/sengketa yang melibatkan bisnis dan hak asasi manusia

Peningkatan sinergi dan koordinasi antar lembaga negara terkait

Stranas BHAM, yang didasarkan pada area fokus prioritas yang dijelaskan di atas:

Strategi 1:

Peningkatan pemahaman dan kapasitas, serta promosi bisnis dan hak asasi manusia

Perumusan dan penyebaran materi pelatihan

Meningkatkan peran media massa dan media sosial, serta lembaga pemerintah dalam hal distribusi dan promosi bisnis dan hak asasi manusia

Penguatan mekanisme non-yudisial berbasis negara untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pemulihan bagi para korban

Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha swasta, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan usaha mikro dan kecil (UMKM), serta masyarakat umum.

Strategi 2:

Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM

Pemetaan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang ada terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia

Perumusan pedoman atau kebijakan praktis/teknis untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam praktik bisnis

Mendorong pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan yang memperhatikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia

Strategi 3:

Penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik kegiatan usaha

Mendorong pelaku usaha untuk memasukkan mekanisme pelaporan ke dalam peraturan internal dan rantai pasoknya

Penguatan akses terhadap keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh kegiatan usaha dan kemitraannya

(lanjutan di halaman 71)

Implementasi Stranas BHAM

Stranas BHAM akan diimplementasikan melalui Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia ("Aksi BHAM"), yang akan berlaku efektif untuk periode tiga tahun antara tahun 2023 hingga 2025. Lebih lanjut, diharapkan dalam implementasinya, Stranas BHAM dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia di dunia usaha, serta bagi pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan perkembangan bisnis dan hak asasi manusia.

Untuk memastikan penerapan Stranas BHAM secara memadai, pemerintah akan membentuk Gugus Tugas Bisnis dan Hak Asasi Manusia ("Gugus Tugas BHAM") yang akan diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menteri") dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga lain dan pihak non-pemerintah. Cabang-cabang Gugus Tugas BHAM juga akan dibentuk di tingkat provinsi untuk lebih memastikan pelaksanaan Stranas BHAM.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi BHAM akan dilakukan oleh Gugus Tugas BHAM, yang juga wajib menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tersebut kepada Menteri setiap bulan September. Masyarakat umum juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Aksi BHAM.

Perpres 60/2023 berlaku sejak 26 September 2023.



Acara Mendatang

Participation Opportunities

Indonesia Pavilion

11th China (Mianyang) Science & Technology International City High-Tech Expo

22nd to 26th November 2023
Mianyang International Convention and Exhibition Center



Sectors	Activities
Investment and trade	Exhibition and Presentation
Science, technology and innovation	Opening Ceremony
Cultural and people-to-people exchanges	Forum
	Open Communication
	Promotion and Release Activities

Participate Now
Email to kikt@kadin.id



For more details
please scan QR or visit
tinyurl.com/MianyangHighTechExpo



Indonesia Product Week

An exhibition to present Indonesia's popular and featured products such as batik & fashion, food & beverage, handicraft, art, and more!

Mianyang, Sichuan, China

22 - 26 NOV 2023




SCAN TO REGISTER AND SHOWCASE YOUR PRODUCTS

PAMERAN

Indonesia Pavilion

11th China (Mianyang) Science & Technology International City High-Tech Expo

22-26 November 2023
Mianyang International Convention and Exhibition Center

PAMERAN

Indonesia Product Week

22-26 November 2023
Mianyang, Sichuan, China

Sekilas Tentang Kadin for Naker

Kadin for Naker merupakan **program pengembangan kapasitas** inisiatif Kadin Indonesia bersama dengan Serikat Buruh di Indonesia dan didukung oleh Pijar Foundation.



SCAN ME

Kadin for Naker hadir dalam bentuk **platform digital** untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri sekaligus menjadi platform link & match antara tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Manfaat Kadin for Naker untuk Pekerja

-  Materi pembelajaran yang dapat diakses **kapan saja**
-  Materi yang disesuaikan dengan **kebutuhan industri**
-  Lowongan kerja dari perusahaan yang **terverifikasi**

Manfaat Kadin for Naker untuk Perusahaan

-  Sarana **peningkatan kualitas SDM** bagi perusahaan
-  **Keterampilan pekerja** yang terverifikasi
-  Peningkatan kapasitas pekerja untuk kinerja yang **lebih optimal**
-  Pencarian tenaga kerja berdasarkan **kompetensi** yang dicari

Kategori Kelas di Kadin for Naker

Mencari Pekerjaan

Pengembangan Diri

Mencari Pendapatan Tambahan

Program Komputer

Bahasa

Keterampilan Industri Spesifik

Tata Cara Mendaftar Kadin for Naker



WIKI WIRAUSAHA

Platform digital yang berfungsi sebagai wadah bagi UMKM, Perusahaan, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung UMKM Indonesia untuk naik kelas

Akses pasar

Akses keuangan

Pelatihan

Kemitraan inklusif

Direktori UMKM



Banyak sekali ilmu dan skill yang saya dapatkan setelah mengikuti program ini. Materinya mudah untuk dipahami, sehingga ilmunya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari bahkan di bisnis yang saya geluti selama ini.

Achmad Muzamil

Pengusaha asal Wonosobo

Mari bergabung dan tampilkan profil perusahaan anda agar terhubung dengan berbagai calon Mitra Perusahaan atau UMKM lainnya.



wikiwirusaha.id

Daftar ke:

wikiwirusaha@kadin.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950

“Menuju Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan”

NZH adalah sebuah inisiatif dari dunia usaha untuk mencapai *Net Zero Emission* di Indonesia. Bersama Kadin, mari wujudkan komitmen perusahaan anda menuju *Net Zero*, melalui:

Science Based Emission

Emission Reduction

Climate Mitigation

Climate Adaptation

Daftar sekarang juga ke

secretariat@netzerohub.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950



EKSPOR BARANG ANDA KE SELURUH DUNIA MELALUI TRADE

TRADE adalah platform Sentra Layanan Dokumen Elektronik KADIN Indonesia yang membantu pembuatan dokumen ekspor seperti *COO*, *Certificate of Export Goods*, *Certificate of Free Sale*, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

Tahapan-tahapan untuk membuat dokumen ekspor:



Klik **Masuk** atau **Daftar** untuk masuk maupun mendaftar akun.

Masukkan alamat email dan password. Jika belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dengan klik **Daftar**.



Pilih **Document Registration** untuk melengkapi data-data mengenai perusahaan.



Lengkapi data-data dan unggah dokumennya, lalu klik **Save Changes**.



Pilih **Create COO** lalu pilih form yang sesuai kebutuhan dengan klik **Create**



Isi form dengan melengkapi data Itinerary dan Goods Item dan unggah dokumennya.



Setelah selesai mengisi form, tunggu beberapa saat hingga status berubah dari **Waiting for Approval** menjadi **Waiting for Payment**. Lalu buka menu **Transaction**, pilih **Pending Transaction**, lalu klik **Pay**. Kemudian lakukan pembayarannya menggunakan **virtual account** yang tertera.



Setelah pembayaran dilunaskan, COO **Siap Dicetak** dan digunakan.

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi **Help desk**:

☎ +62 882-1975-0620 (LEO) ☎ +62 882-9208-4913 (ALDI)





KADIN INDONESIA



Informasi lanjutan terkait **pasar internasional** dapat ditemukan di sini:

bsd-kadin.id

WIKI WIRUSAHA



Temukan informasi menarik bagi **pengembangan bisnis UMKM** di sini:

Wikiwirusaha.id



Temukan layanan **pengurusan dokumen dagang** di sini:

trade.kadin.id



Ikut bergabung dalam ekosistem **bisnis berkelanjutan** di sini:

Netzerohub.id



Kembangkan **kapasitas** dan kesempatan meningkatkan **jenjang karir** di sini:

kadinfornaker.id

Disusun oleh
Humas Sekretariat Kadin Indonesia

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484



kadin.indonesia.official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



www.kadin.id